

**ANALISIS PENGARUH OPINI AUDIT DAN TEMUAN
AUDIT TERHADAP PENGUNGKAPAN LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO**

(Studi Kasus BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan)

Diajukan Oleh:

SUKARMAN

4515013020



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BOSOWA

2019

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit Terhadap
: Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Jeneponto

Nama Mahasiswa : Sukarman

Stambuk/NIM : 4515013020

Fakultas : Ekonomi

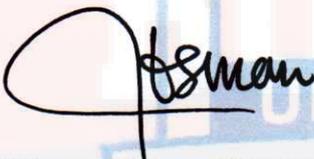
Program Studi : Akuntansi

Tempat Penelitian : Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

Telah Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



DR. Firman Menne, S.E., M.Si., AK., CA



DR. H.A. Arifuddin Mane, S.E., M.Si., SH., MH

Mengetahui dan Mengesahkan :

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

**Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Bosowa**

**Ketua Program Studi
Akuntansi**




DR. H.A. Arifuddin Mane, S.E., M.Si., SH., MH



DR. Firman Menne, S.E., M.Si., AK., CA

Tanggal Pengesahan :

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh, Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Karena rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto”. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memnuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari pihak, baik dari masa awal perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Terutama kepada kedua orang tua penulis yang selalu medoakan untuk kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga memberikan bantuan secara moril dan materil. Untuk Bapak yang selalu siap sedia membantu penulis dalam hal tukar pikiran jika ada yang penulis tidak mengerti dengan teori yang berkaitan dengan penelitian. Untuk Ibu yang selalu memberikan motivasi dan kasih sayangnya kepada penulis. Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-sebesaranya kepada:

1. Prof. DR. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng. Selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar, yang telah menyetujui skripsi ini sehingga proses penyusunan skripsi ini bisa berjalan sesuai dengan harapan.
2. Bapak H. A. Arifuddin Mane, SE.,M.Si.,SH.,MH. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis sekaligus sebagai pembimbing yang telah menyetujui dan memberi bantuan selama proses penyusunan skripsi ini.

3. Ayahanda DR. Firman Menne, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku ketua program studi akuntansi sekaligus sebagai dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran dalam mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.
4. Bapak Adil Setiawan, A.Md.,SE.,M.Si.,Ak.,CA dan Ibu DR. HJ. Herminawaty. Abubakar; SE.,MM. selaku dosen penguji, terima kasih atas saran terhadap penelitian ini.
5. Teman-teman seperjuangan selama masa perkuliahan dan yang sudah mengisi hari-hari selama berkuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa. yaitu Icel, Ranggon, Sherly, Fika, Cabe, Oliv,Ervi.
6. Teman-teman seperjuangan selama menjalani bimbingan, Rahman, Dika, Damar, Agung.
7. Dan pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu proses pengerjaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih kurang sempurna. Karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 10 Juli 2019



Sukarman

PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

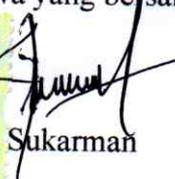
Nama : Sukarman
Nim : 4515013020
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Judul : Analisis Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto (Studi Kasus BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penyusunan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dala naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 10 Juli 2019

Mahasiswa yang bersangkutan


Sukarman

METERAI
TEMPEL
TGL
1F09CAHF066501597
6000
ENAM RIBU RUPIAH

**ANALISIS PENGARUH OPINI AUDIT DAN TEMUAN AUDIT
TERHADAP PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
(Studi Kasus BPK RI Perwakilan Provinsi Selatan)**

Oleh:

SUKARMAN

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bosowa Makassar

ABSTRAK

SUKARMAN. 2019. SKRIPSI. Analisis Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto (Studi Kasus BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan), Dibimbing oleh DR. Firman Menne, SE.,M.Si.,Ak.,CA dan DR. H. A. Arifuddin Mane, SE.,M.Si.,SH.,MH.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh opini audit dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah yang berada di pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto. Dalam penelitian ini menggunakan model penelitian dengan menyebar kuesioner kepada auditor yang ada di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, yang meneliti pengaruh opini audit dan temuan audit terhadap pengungkapan laporan keuangan. Hasil penelitian dengan menggunakan SPSS menunjukkan bahwa variabel opini audit dan temuan audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan. Temuan audit bukan variabel yang paling berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan. Sedangkan untuk opini dan temuan audit secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan.

Kata Kunci:

Opini Audit, Temuan Audit, Pengungkapan Laporan Keuangan.

ABSTRACT

ANALYSIS OF EFFECT OF AUDIT OPINION AND AUDIT FINDINGS FOR DISCLOSURE LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENT IN JENEPONTO DISTRICT

(Case Study BPK Republic of Indonesian in South Sulawesi)

By:

SUKARMAN

Accounting Study Program

Faculty of Economics and Business

Bosowa University

ABSTRACT

SUKARMAN. 2019. Thesis. Analysis of the Effect of Audit Opinion and Audit Findings on Disclosures of the Jeneponto Regional Government Financial Statements (Case Study of the Republic of Indonesia BPK Representative of South Sulawesi Province), Guided by DR. Firman Menne, SE., M.Si., Ak., CA and DR. H. A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH.

This research was conducted to analyze the effect of audit opinion and audit findings on the level of disclosure of financial statements of local governments in the local government of Jeneponto district. In this study using a research model by distributing questionnaires to auditors in the Republic of Indonesia Representative Office of the Republic of Indonesia Representative Office BPK, who examined the effect of audit opinions and audit findings on financial statement disclosures. The results of the study using SPSS indicate that audit opinion variables and audit findings have a positive and significant effect on the disclosure of financial statements. Audit findings are not the variables that most significantly influence the disclosure of financial statements. Whereas for audit opinions and findings together or simultaneously affects the disclosure of financial statements.

Keywords:

Audit Opinion, Audit Findings, Disclosure Financial Statement.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEORISINALAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Definisi Akuntansi Pemerintahan.....	8
2.2 Tujuan Audit Sektor Publik.....	9
2.3 Akuntabilitas dan Transparansi	9
2.4 Landasan Teori	11
2.4.1 Teori (<i>Signalling Theory</i>) Pada Pemerintahan	11
2.4.2 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	12
2.5 Pemeriksaan Keuangan Daerah.....	13
2.5.1 Badan Pemeriksa Keuangan	14

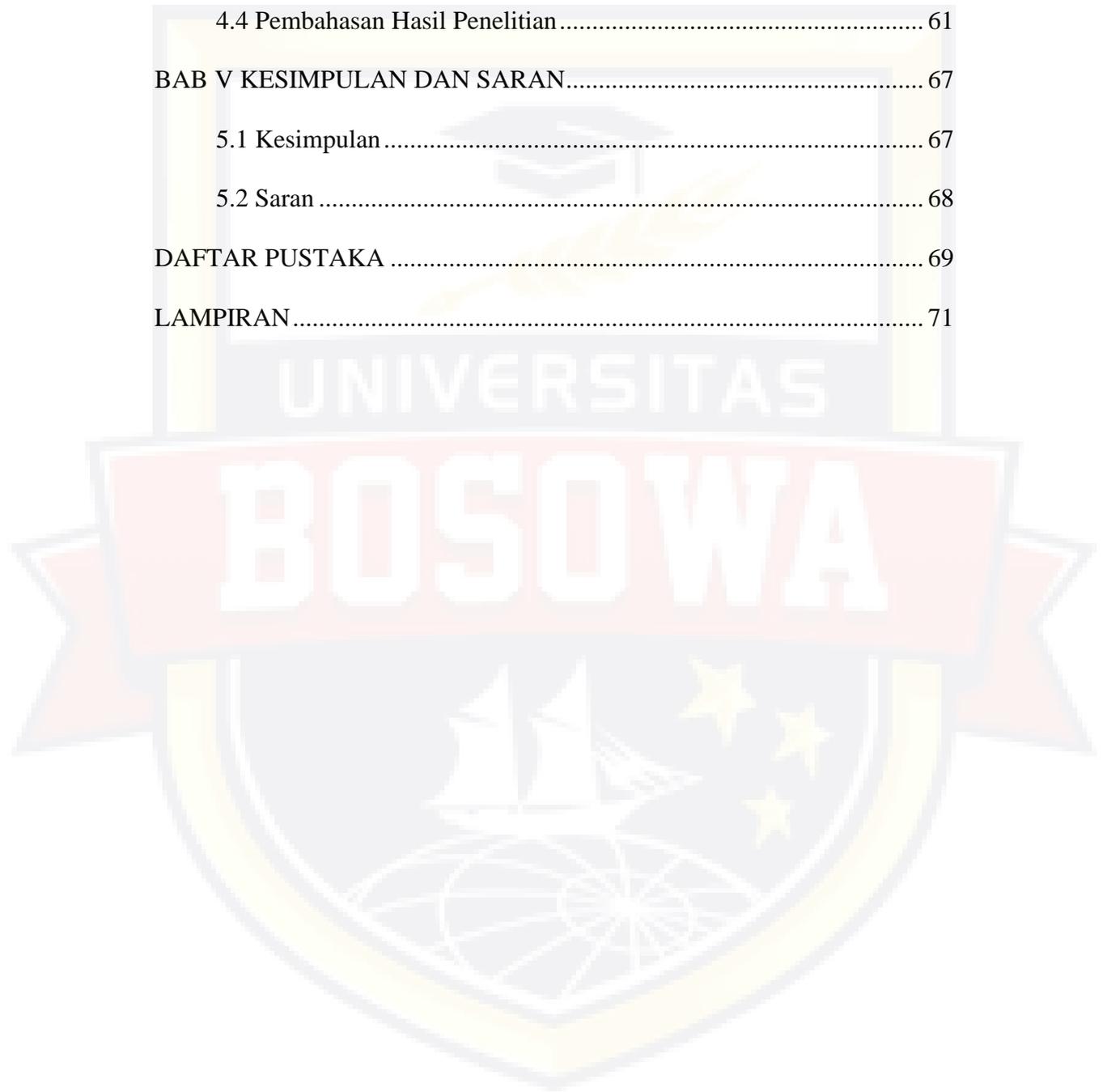
1. Pemeriksaan Keuangan	14
2. Pemeriksaan Kinerja.....	15
3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	15
2.6 Hasil Pemeriksaan	17
2.6.1 Opini Audit.....	17
1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (<i>Unqualified Opinion</i>)	17
2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Bahasa Penjelasan (<i>Modified Unqualified Opinion</i>).....	17
3. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (<i>Qualified Opinion</i>)	18
4. Pendapat Tidak Wajar (<i>Adverse Opinion</i>).....	19
5. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (<i>Disclaimer of Opinion</i>)	19
2.6.2 Temuan Audit.....	20
1. Kelemahan Sistem Pengendalian Internal	20
2. Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	21
3. Tingkat Penyimpangan.....	21
2.7 Pengungkapan Dalam Laporan Keuangan	21
2.8 Pemeriksaan Keuangan LKPD.....	23
2.9 Kerangka Pikir.....	24
2.10 Hipotesis.....	25

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	26
3.1 Daerah Penelitian dan Waktu Penelitian.....	26
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	26
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	26
3.4 Populasi dan Sampel.....	27
3.5 Metode Analisis.....	27
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	27
3.5.2 Uji Kualitas Data.....	28
3.4.2.1 Uji Validitas.....	28
3.4.2.2 Uji Reliabilitas.....	28
3.5.3 Uji Asumsi Klasik.....	29
1. Uji Normalitas.....	29
2. Uji Heterokedastisitas (<i>heterocedasticity</i>).....	30
3. Uji Multikolinearitas (<i>Multicolinearity</i>).....	30
4. Uji Autokorelasi.....	31
3.5.4 Uji Hipotesis.....	31
1. Uji F-Statistik.....	31
2. Uji Persamaan Regresi Linear Berganda.....	31
3. Koefisien Determinasi (R^2).....	32
4. Uji T-Statistik.....	32
3.6 Definisi Operasional.....	33
3.6.1 Variabel Independen.....	33
3.6.2. Variabel Dependen.....	34

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL	35
4.1 Gambaran Umum Instansi	35
4.1.1 Dasar Hukum dan Kedudukan BPK RI	35
4.1.2 Sejarah Perwakilan.....	36
4.1.3 Visi dan Misi BPK RI	37
4.1.4 Struktur organisasi BPK RI Perwakilan Provinsi	
Sulawesi Selatan	37
4.1.5 Pembagian Tugas	38
a. Kepala Sub Auditorat Sul-Sel I.....	39
b. Kepala Sub Auditorat Sul-Sel II.....	39
c. Kepala Sub Auditorat Sul-Sel III	39
d. Kepala Sekretariat Perwakilan	40
e. Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia (SDM)	40
f. Kepala Subbagian Keuangan.....	41
g. Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat	
dan Tata usaha Kepala perwakilan.....	41
h. Kepala Subbagian Umum dan Teknologi Informasi ...	41
i. Kepala Subbagian Hukum	42
4.2 Deskripsi Data Penelitian	42
4.2.1 Karakteristik Responden.....	43
1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	43
2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ...	44
3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang	

Pendidikan	45
4. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja....	46
5. Karakteristik Responden Berdasarkan Pembagian	
Wilayah (Sub Auditorat)	47
4.3 Analisis Data.....	48
4.3.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif	48
1. Opini Audit (X_1).....	49
2. Temuan Audit (X_2).....	50
3. Pengungkapan Laporan Keuangan.....	50
4.3.2 Hasil Uji Kualitas Data.....	50
1. Uji Validitas Data.....	50
a. Opini Audit	51
b. Temuan Audit.....	52
c. Pengungkapan Laporan Keuangan	52
2. Uji Reliabilitas Data.....	53
4.3.3 Uji Asumsi Klasik	53
1. Uji Normalitas	53
2. Uji Heterokedastisitas	54
3. Uji Multikorelasi	55
4. Uji Autokorelasi	56
4.3.4 Hasil Uji Hipotesis	57
1. Uji Statistik t	57
2. Persamaan Regresi	59

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	59
4. Uji F Statistik	60
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian.....	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	71



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Rincian Responden Penelitian	42
Tabel 4.2 Pengembalian Kuesioner.....	43
Tabel 4.3 Demografi Responden Berdasarkan Umur	43
Tabel 4.4 Demografi Berdasarkan Jenis Kelamin.....	44
Tabel 4.5 Demografi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan	45
Tabel 4.6 Demografi Responden Berdasarkan Lama Bekerja.....	46
Tabel 4.7 Demografi Responden Berdasarkan Sub Auditorat.....	47
Tabel 4.8 Analisis Statistik Deskriptif	49
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Opini Audit	51
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Temuan Audit	52
Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Laporan Keuangan	52
Tabel 4.12 Hasil Uji Reliabilitas Data Instrumen	53
Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas	54
Tabel 4.14 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	55
Tabel 4.15 Hasil Uji Multikorelasi.....	56
Tabel 4.16 Hasil Uji Autokorelasi	57
Tabel 4.17 Hasil Uji T-Statistik	58
Tabel 4.18 Hasil Uji Determinasi.....	60
Tabel 4.19 Hasil Uji F-Statistik	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Opini Audit Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Sulawesi-Selatan.....	4
Gambar 1.2	Perkembangan Opini Audit Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jenepono	5
Gambar 4.1	Struktur Organisasi BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan	38
Gambar 4.2	Grafik Demografi Responden Berdasarkan Umur Responden	44
Gambar 4.3	Grafik Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	45
Gambar 4.4	Grafik Demografi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan	46
Gambar 4.5	Grafik Demografi Responden Berdasarkan Lama Bekerja....	47
Gambar 4.6	Grafik Demografi Responden Berdasarkan Sub Auditorat....	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbagai kritik mengenai peran organisasi sektor publik dalam pembangunan telah mengalami perubahan yang dramatis. Pada tahun 1950-an dan 1960-an sektor publik memerankan peranan utama sebagai pembuat dan pelaksana strategi pembangunan istilah sektor publik baru dipakai pada tahun 1952. Baru pada tahun 1980-an reformasi sektor publik dilakukan di Negara-Negara industri maju sebagai jawaban atas berbagai kritikan yang ada. Berbagai perubahan dilakukan misalnya dengan mengadopsi pendekatan *New Public Management* (NPM) dan *reinventing government* dibanyak negara terutama Negara Anglo-Saxon. NPM berakar dari teori manajemen yang pada dasarnya yang beranggapan bahwa praktik bisnis komersial dan manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan praktik dan manajemen pada sektor publik. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kinerja sektor publik, perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan disektor swasta kedalam sektor publik, seperti pengadopsian mekanisme pasar, kompetisi tender, dan privatisasi perusahaan-perusahaan publik.

Dengan adanya perubahan pada sektor publik tersebut terjadi pula perubahan pada akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik kemudian mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perusahaan-perusahaan yang terjadi. Sebagai contoh adalah terjadinya perubahan sistem akuntansi dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual. Perubahan tersebut merupakan

bagian penting dari proses reformasi sektor publik di Negara-Negara Anglo-Saxon. Pemerintah New Zealand yang dianggap paling maju dan sukses dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual telah mengadopsi sistem akuntansi tersebut sejak tahun 1991 yang kemudian diikuti Jepang, Itali dan Negara-Negara eropa lainnya, tujuan memperkenalkan sistem akuntansi berbasis akrual adalah untuk membantu meningkatkan transparansi dan memperbaiki efisiensi dan efektivitas sektor publik.

Di Indonesia semenjak terjadinya krisis ekonomi yang melanda pada awal tahun 1996 dan puncaknya tahun 1997, pemerintah pusat memutuskan untuk mendelegasikan sebagian wewenang untuk pengelolaan keuangan kepada daerah, sehingga daerah diharapkan dapat membiayai pembangunan atas keuangan sendiri, otonomi daerah yang diamankan oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan diamandemen menjadi Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, intinya adalah adanya pendelegasian kewenangan kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintah dan kepentingan masyarakatnya secara mandiri dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut, pemerintah daerah berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk upaya pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel dan transparan adalah dengan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar bisa menyajikan

informasi yang mudah diakses, dipahami dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Peraturan ini mengamanatkan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk melaporkan transaksi dan mengungkapkan transaksi keuangan pada catatan atas laporan keuangannya berdasarkan SAP. Terdapat hasil penelitian yang menunjukkan tingkat pengungkapan untuk Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) cenderung cukup tinggi. Sementara tingkat pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) masih rendah (Rahardian; Wijayanti,2008).

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), terutama kendala yang membuat kualitas pengungkapan yang sesuai dengan SAP menjadi rendah, diantaranya yaitu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah yang belum memadai, inkonsistensi dalam menerbitkan peraturan perundangan terkait akuntansi pemerintahan dan kurangnya sosialisasi serta pendampingan untuk daerah-daerah yang relatif terpencil yang dilakukan oleh Depdagri, Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pihak-pihak lain yang terkait tentang penerapan SAP.

Kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah tersebut menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan tingkat pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Daerah berdasarkan

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Indonesia masih rendah yaitu rata-rata pengungkapan sebesar 33.45% (Liestiani, 2008), 52.57% (Mandasari, 2009), 54.54% (Retnoningsuh, 2009) dan 22% (Lesmana, 2010). Dari jumlah persentase pengungkapan tersebut dapat diartikan belum adanya pemerintah daerah yang mengungkapkan secara penuh dalam laporan keuangan daerah masing-masing.

Pemerintah daerah di Indonesia pada Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Jeneponto masih belum bisa memberikan pertanggungjawaban yang baik terkait pengelolaan keuangan daerahnya, dari hasil audit BPK masih ada 4 daerah yang belum mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun 2017 termasuk Kabupaten Jeneponto.

Gambar 1.1
Opini Audit Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Sulawesi-Selatan



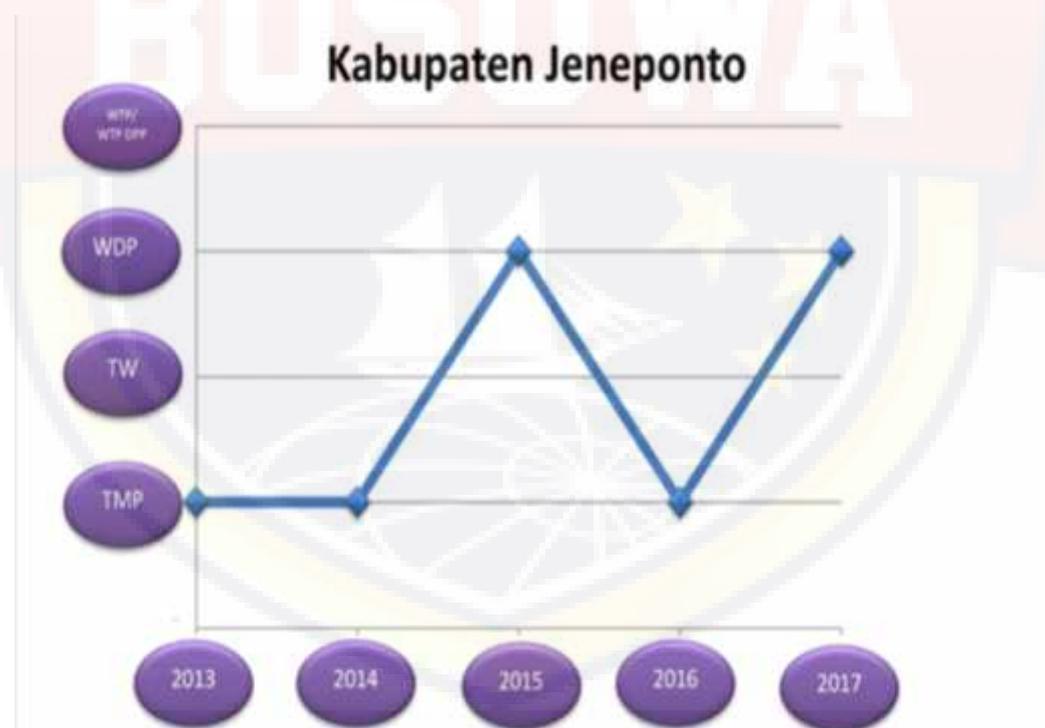
Keterangan : ● : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

● : Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2018

Untuk daerah Kabupaten Jeneponto selama tahun 2013-2017 BPK perwakilan Sulawesi Selatan memberikan opini di tahun 2013, Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), di tahun 2014, Tidak menyatakan pendapat (TMP), di tahun 2015 Wajar Dengan Pengecualian (WDP), di tahun 2016, Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), di tahun 2017, Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Berdasarkan pada kondisi tersebut menjadi menarik untuk menelaah lebih jauh dan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan pada laporan keuangan yang diakibatkan oleh opini audit dan temuan audit yang dilakukan oleh BPK terhadap Kabupaten Jeneponto. Data tersebut dapat kita lihat pada grafik dibawah ini:

Gambar 1.2
Perkembangan Opini Audit Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jeneponto



Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2018

Liestiani (2008) dalam penelitiannya menggunakan jumlah temuan audit dan nilai temuan sebagai salah satu yang mempengaruhi pengungkapan. Hasil

penelitian tersebut menunjukkan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah memiliki hubungan positif dengan jumlah temuan audit. Hal ini membuktikan teori yang mengatakan bahwa pemerintah daerah akan memenuhi rekomendasi yang diberikan oleh BPK untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan pengungkapan pada laporan keuangannya. Sebaliknya, nilai temuan memiliki hubungan negatif dengan pengungkapan laporan keuangan daerah. Hasil ini membuktikan hipotesis yang dibuat yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat penyimpangan, maka pemerintah cenderung untuk menutupi penyimpangan tersebut, maka tingkat pengungkapan menjadi rendah.

Di Indonesia, untuk semua proses audit sektor publik dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai satu-satunya Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan sektor publik. Sehingga untuk melakukan penelitian terhadap kualitas audit di lingkungan sektor publik tidak bisa menggunakan atribut KAP seperti *Audit Firm Size* dan *Audit Fee* seperti penelitian yang dilakukan oleh Copley (1991).

Oleh karena itu, penulis dalam penelitian ini mencoba meneliti pengaruh audit terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Permasalahan mengenai opini audit terhadap pengungkapan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) inilah yang menarik penulis untuk membahasnya dalam skripsi. Sehingga hal ini mendorong penulis untuk mengangkat topik ini yaitu **“Analisis Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu apakah opini audit dan temuan audit berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh opini audit dan temuan audit terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis. Penelitian ini menambah pengetahuan penulis terhadap faktor-faktor yang penting yang harus diperhatikan dalam melakukan pengujian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Bagi Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas laporannya agar lebih dapat diandalkan.
3. Bagi BPK. Sebagai kontrol untuk memastikan setiap rekomendasi dari temuan audit sudah ditindak lanjuti atau belum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Akuntansi Pemerintahan

Menurut Utary & Ikbal (2014:14-15) Dalam buku audit sektor publik mereka mendefinisikan Akuntansi Pemerintahan sebagai berikut:

Bila berbicara tentang sektor publik atau pemerintahan bahwa institusi sektor publik wajib keberadaannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat tentu memiliki konsekuensi pendanaan, artinya dibutuhkan anggaran pengeluaran sebagai akibat aktivitas pelayanan tersebut. Dana atau anggaran pengeluaran dikelola harus dipertanggungjawabkan dengan menggunakan model pertanggungjawaban yang memiliki standar akuntansi pemerintahan. Sektor publik adalah manajemen keuangan yang berasal dari publik sehingga menimbulkan konsekuensi untuk dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan demikian, pengelolaannya memerlukan keterbukaan atau transparansi dan akuntabilitas terhadap publik.

Dalam setiap institusi sektor publik wajib adanya akuntansi yang disebut sebagai akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh Lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik. Sekarang terdapat perhatian yang makin besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan oleh Lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor publik pemerintahan maupun publik non-pemerintahan. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara transparan dan bertanggungjawab.

Organisasi sektor publik menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial dan memanfaatkannya bagi publik, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Berbagai tuntutan tersebut menyebabkan akuntansi yang diterima sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik. Akuntansi sektor publik sedang mengalami proses untuk menjadi disiplin ilmu yang lebih dibutuhkan. Organisasi sektor publik luas lingkungannya dengan berbagai karakteristik. Ruang lingkup akuntansi sektor publik meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unit-unit kerja pemerintah), organisasi sukarelawan, Rumah Sakit, Perguruan Tinggi dan Universitas, Yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi politik, dan sebagainya.

Seperti telah disebutkan di atas, proses pencatatan akuntansi harus memiliki standarisasi yang sama. Sistem akuntansi untuk badan-badan pemerintahan harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) seperti dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 pasal 51 ayat 3, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Disisi lain, unit-unit pemerintahan yang bergerak dibidang bisnis (BUMN dan BUMD) harus mengikuti standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Sementara itu, organisasi publik non pemerintahan mengikuti standar akuntansi keuangan.

2.2 Tujuan Audit Sektor Publik

Menurut Utary & Ikbal (2014:20) Dalam buku audit sektor publik mereka mendefinisikan tujuan audit sebagai berikut:

Lembaga sektor publik merupakan lembaga masyarakat, milik dan untuk masyarakat. Organisasi sektor publik mendapat amanah dan kepercayaan dari masyarakat untuk menggunakan sumber daya publik. Oleh karena itu, mereka dituntut untuk mengelola sumber daya tersebut secara akuntabel dan transparansi pengelolaan sumber daya tersebut diperlukan audit pada sektor publik. Hasil audit berupa informasi. Informasi yang diperoleh dari hasil audit sektor publik dapat digunakan oleh pihak internal untuk melaksanakan perbaikan internal. Disamping itu, hasil audit juga diperlukan oleh pihak eksternal untuk mengevaluasi apakah sumber daya publik dan menggunakan kewenangannya secara tepat dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan, apakah program yang dilaksanakan mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan, apakah pelayanan publik diselenggarakan secara efektif, efisien, ekonomis, etis, dan berkeadilan.

Tujuan audit sektor publik diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Undang-undang ini menyatakan bahwa pemeriksaan berfungsi untuk mendukung keberhasilan upaya pengelolaan keuangan negara secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Akuntabilitas dan Transparansi

Dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah melakukan reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang harus dilakukan oleh

Pemerintah Daerah. reformasi tersebut dituangkan dalam beberapa peraturan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang ini juga menekankan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Keuangan Negara. Sejalan dengan undang-undang ini, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 yang diamandemen menjadi PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Peraturan ini menekankan pada peran akuntansi dan pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai wujud dari prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Negara. Yang dimaksud dengan transparansi yaitu informasi keuangan daerah harus mampu menyajikan dan menyediakan informasi yang terbuka serta mudah diakses dan dipahami oleh semua pihak sesuai peraturan-peraturan yang berlaku. Sedangkan akuntabel adalah pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk penyelenggaraan pemerintah seharusnya didukung dengan suatu pengawasan yang cukup andal guna menjamin pendistribusian dana yang merata pada semua sektor publik sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan. Salah satu upaya konkrit pemerintah dalam mempertanggungjawabka pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel dan transparan adalah dengan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu antara lain undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Negara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

pedoman pengelolaan Keuangan Daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

2.4 Landasan Teori

2.4.1 Teori Sinyal (*Signalling Theory*) Pada Pemerintah Daerah

Masyarakat sebagai menggunakan laporan keuangan daerah menuntut transparansi dari segala hal informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerahnya. Oleh karena itu pemerintah daerah wajib menyediakan informasi untuk memenuhi keinginan masyarakat dengan mengurangi asimetri informasi. Informasi yang diungkapkan oleh pemerintah daerah memberikan sinyal yang menggambarkan kualitas pengelolaan pemerintah daerah tersebut. Menurut Chariri dan Ghozali dalam Lesmana (2010) pengungkapan dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*).

Dalam pandangan teori sinyal, entitas yang berkualitas akan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan dengan memberikan pengungkapan atau pemberian informasi yang lengkap. Informasi akuntansi merupakan sinyal bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang mempunyai prospek yang baik dimasa mendatang (*good news*). Pengungkapan pada laporan keuangan pada dasarnya merupakan bentuk penyampaian informasi dari suatu entitas kepada pengguna laporan keuangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin banyak pengungkapan yang dilakukan oleh entitas maka semakin menunjukkan bahwa entitas tersebut semakin berkualitas.

Penyampaian informasi-informasi berupa pengungkapan sukarela yang dilakukan pemerintah daerah pada laporan keuangannya juga dapat meningkatkan kredibilitasnya dan menggambarkan akuntabilitas serta transparansi meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan. Beberapa penelitian akademik menunjukkan semakin besar suatu entitas makin banyak informasi sukarela disampaikan. Pengungkapan yang bersifat sukarela merupakan sinyal positif bagi suatu entitas (pemerintah daerah). Suatu entitas dapat meningkatkan nilai entitasnya dengan cara mengurangi asimetri informasi. Suatu entitas memberikan sinyal kepada pihak luar (masyarakat) yang dapat berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya dan dapat mengurangi ketidakpastian mengenai pengelolaan pemerintah daerah pada masa-masa selanjutnya.

Pengungkapan informasi mempertimbangkan biaya dan manfaat yang pengukurannya relatif sulit dilakukan terutama pengukuran manfaat. Seberapa luas informasi yang diungkapkan perlu mendapat perhatian agar informasi yang disajikan tidak terlalu banyak yang dapat menyebabkan *noise* dan tidak terlalu sedikit yang dapat menyesatkan masyarakat sebagai pengguna.

2.4.2 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan teori yang membahas hubungan antara prinsipal dengan agen. Hubungan agensi terjadi ketika prinsipal mempekerjakan agen untuk memberikan suatu jasa mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Hubungan ini menyebabkan 2 permasalahan yaitu informasi asimetri dan konflik kepentingan. Informasi asimetri terjadi karena agen mempunyai informasi

lebih banyak dibandingkan dengan prinsipal sehingga agen dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk kepentingannya sendiri.

Ririn Hendriyani dan Afrizal Tahar (2015) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa:

Terdapat perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agent, sehingga agent tidak selamanya mengikuti keinginan prinsipal. Hubungan keagenan tersebut juga terjadi di pemerintahan antara rakyat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen. Pemerintah dapat melakukan kebijakan yang hanya mementingkan pemerintah dan penguasa serta mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Untuk mengurangi konflik maka diperlukan monitoring oleh prinsipal atas apa yang dilakukan oleh agen. Laporan keuangan dan pengungkapan informasi kepada publik adalah salah satu bentuk alat monitoring untuk mengurangi agency cost.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Jensen dan Meckling dalam Setyaningrum (2012) bahwa:

Teori keagenan mengasumsikan masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Pada sektor swasta terjadi antara pemegang saham (prinsipal) dengan manajemen (agen), sedangkan disektor pemerintah terjadi antara rakyat (prinsipal) dengan pejabat yang dipilih atau pemerintah (agen). Selain itu disektor pemerintah terdapat politisi yang mempunyai peran ganda baik sebagai prinsipal maupun agen. Sebagai prinsipal karena merupakan perwakilan dari rakyat dalam hubungannya dengan pemerintah, sedangkan sebagai agen karena menjalankan tugas pengawasan yang diberikan oleh rakyat. Kemungkinan konflik yang timbul disektor pemerintah ketika pejabat yang dipilih atau pemerintah dalam menjalankn pemerintahan mementingkan kepentingannya sendiri sehingga mengorbankan kepentingan rakyat. Untuk mengurangi konflik tersebut, rakyat maupun politisi perlu memonitoring apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Selain memonitoring dari rakyat dan politisi, pemerintah perlu menerbitkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

2.5 Pemeriksaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, yang dimkasud dengan pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang

dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan keuangan daerah. Lembaga eksternal dan independen yang melakukan pemeriksaan keuangan daerah adalah:

2.5.1 Badan Pemeriksa Keuangan

Sebelum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus diperiksa (diaudit) terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan masing-masing daerah tersebut, sebagaimana diamanahkan dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa. Laporan keuangan yang telah diperiksa (diaudit) oleh BPK, selambat-lambatnya 6 bulan. Pelaksanaan pemeriksaan dalam sektor pemerintahan oleh BPK-RI dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara, yang menyebutkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terdiri atas 3 (tiga) jenis pemeriksaan yaitu:

1. Pemeriksaan Keuangan

Salah satu tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah melaksanakan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan memberikan keyakinan

yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Pemeriksaan tersebut dilakukan dalam rangka memberikan pendapat atau opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

2. Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan kinerja bertujuan menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. pemeriksaan ekonomis dan efisiensi menentukan apakah entitas telah memperoleh, melindungi dan menggunakan sumberdayanya secara hemat dan efisien. Pemeriksaan dengan aspek efektivitas bahwa apakah program yang baru akan dijalankan atau yang sedang berjalan sudah memadai dan tepat atau relevan.

3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. PDTT tidak memberikan opini ataupun untuk memberikan penilaian kinerja. PDTT bersifat eksaminasi (pengujian), *review*, atau prosedur yang disepakati.

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang bebas, mandiri dan profesional yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Dalam menjalankan tugasnya, BPK menggunakan Standar

Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam peraturan Badan pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2007 sebagai landasan operasional dalam melakukan pemeriksaan secara efektif. Kriteria yang menjadi pertimbangan dalam penentuan opini, yaitu:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
2. Efektivitas sistem pengendalian internal.
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
4. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*)

Sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Opini audit ini diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk memberikan kinerja yang lebih baik, lebih trnsparan partisipatif dan bertanggungjawab.

Pemeriksaan BPK ditekankan kepada pengujian atas bukti-bukti yang mendukung penyajian saldo-saldo akun dalam Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), pengujian transaksi pada LRA dan Laporan Arus Kas (LAK), penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan, pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pengujian atas pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), dan penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Meskipun tujuan pemeriksaan BPK bukan untuk mencari kesalahan atau penyimpangan, namun bila dari hasil pengujian

audit ditemukan penyimpangan, BPK berkewajiban mengungkapkannya sebagai temuan audit.

2.6 Hasil Pemeriksaan

2.6.1 Opini Audit

Opini adalah pernyataan profesional pemeriksaan atau tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, pengertian ini terdapat dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Auditor dapat memilih tipe pendapat yang akan dinyatakan atas laporan keuangan:

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan audit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian diterbitkan oleh auditor jika kondisi laporan keuangan terpenuhi seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, dan tidak ada keadaan yang mengharuskan auditor untuk menambah paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit.

2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Bahasa Penjelasan (*Modified Unqualified Opinion*)

Pada keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan (Bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan

audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan. Keadaan yang menjadi penyebab utama ditambahkannya suatu paragraf penjelasan dalam laporan keuangan adalah:

- a. Ketidakkonsistenan dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah.
- b. Keraguan besar tentang kelangsungan hidup entitas atau instansi.
- c. Auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh BPK.
- d. Penekanan pada suatu hal tertentu.

3. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Melalui pendapat dengan pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, kecuali untuk dampak hal-hal dikecualikan. pendapat wajar dengan pengecualian dinyatakan dalam keadaan:

- a. Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa tidak dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dan berkesimpulan tidak menyatakan tidak memberikan pendapat.
- b. Auditor yakin atas dasar auditnya, bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi berterima umum, yang

berdampak material dan berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat wajar. Bila auditor menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian auditor harus menjelaskan semua alasan yang menyebabkan kesimpulan bahwa terdapat penyimpangan.

4. Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Dengan pendapat tidak wajar auditor menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangannya dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

5. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer of Opinion*)

Auditor menyatakan bahwa tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan jika auditor tidak melaksanakan audit yang berlingkup memadai untuk memungkinkan auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pernyataan tidak memberikan pendapat juga dapat diberikan auditor jika auditor tidak dalam kondisi independen dalam hubungannya dengan klien. Akan tetapi jika auditor tidak memberikan pendapat dalam laporan auditnya auditor harus memberikan semua alasan substantif yang mendukung pernyataan tersebut, yang dicantumkan sebelum paragraf pendapat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK di Tahun 2017 menunjukkan bahwa di Sulawesi Selatan terdapat 4 Daerah yang masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), diantaranya adalah Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Enrekang. Hal ini menunjukkan bahwa dari 24 Daerah Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan sudah 20 daerah kabupaten dan kota yang sudah

mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini menandakan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan secara umum dapat dikategorikan sebagai Provinsi yang laporan keuangannya memenuhi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

2.6.2 Temuan Audit

Sudah dijelaskan sebelumnya di atas bahwa tujuan pemeriksaan (audit) BPK adalah untuk melakukan pengujian dan mendeteksi salah saji material yang terdapat didalam laporan keuangan. Bila hasil pengujian audit ditemukan penyimpangan, maka BPK berkewajiban mengungkapkannya sebagai temuan audit. Salah saji ini dapat disebabkan oleh kelemahan pengendalian internal maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap informasi dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, pemeriksaan harus merancang pemeriksaan untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pemeriksaan juga harus waspada terhadap kemungkinan adanya indikasi kecurangan serta ketidakpastian. kemudian pada setiap akhir pemeriksaan, auditor akan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap temuan audit. Temuan dan rekomendasi tersebut akan dikomunikasikan dengan objek pemeriksaan atau pemerintah daerah yang diaudit agar dilakukan perbaikan dan koreksi.

1. Kelemahan Sistem Pengendalian Internal

Unsur pemantauan pada SPI pemerintah daerah belum optimal. Hasil evaluasi SPI menunjukkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dapat

dikelompokkan pada kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian internal.

2. Ketidapatuhan Terhadap Perundang-Undangan

Selain evaluasi atas SPI, hasil pemeriksaan juga mengungkapkan adanya ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi,

3. Tingkat Penyimpangan

Temuan audit dapat dilihat dari segi keterjadian kasus maupun nominalnya. Temuan audit yang mempunyai nominal rupiah terdapat pada temuan ketidapatuhan terhadap perundang-undangan. Temuan tersebut dapat mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Tingkat penyimpangan audit merupakan nilai nominal temuan dibandingkan dengan total realisasi belanja daerah.

2.7 Pengungkapan Dalam Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Penyediaan informasi tersebut untuk kepentingan transparansi, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. Transparansi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh

pemangku kepentingan (Masyarakat). Menurut PSAP 01 Paragraf 23 yang dimaksud dengan pengungkapan dalam arti luas, meliputi pos-pos yang disajikan dalam setiap lembar muka laporan keuangan, maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengungkapan informasi yang memadai, baik data yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, harus ditekankan pada informasi yang material dan relevan yang dapat dipergunakan dalam pengambilan keputusan. Pengungkapan harus dapat menambah nilai informasi dan bukan mengurangi dengan adanya keterangan yang terlalu terinci dan sulit dianalisis.

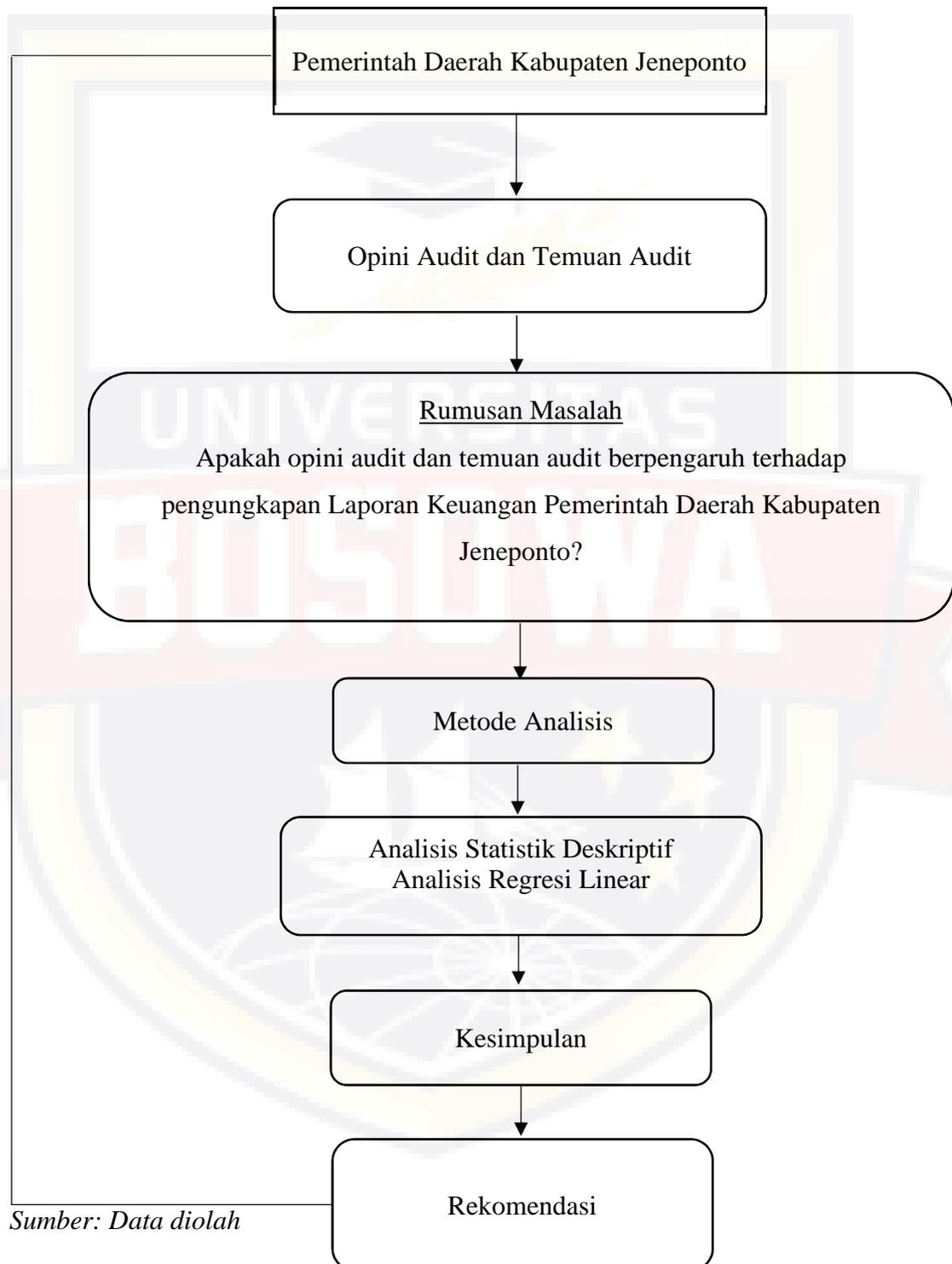
Terdapat beberapa peneliti terdahulu yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Lestiani (2008) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan dan menggunakan temuan audit dan nilai temuan sebagai salah satu yang mempengaruhi pengungkapan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah memiliki hubungan positif dengan jumlah temuan audit. Sebaliknya, nilai temuan memiliki hubungan negatif dengan pengungkapan laporan keuangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan juga diteliti oleh Lesmana (2010) dalam penelitian tersebut faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan dilihat dari segi karakteristik pemerintah daerah, dalam penelitiannya Lesmana menggunakan ukuran pemerintah, kewajiban, pendapatan transfer, umur pemerintah daerah, jumlah satuan kerja perangkat daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan umur pemerintah dan rasio kemandirian

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan. Namun, untuk ukuran pemerintah daerah, kewajiban, pendapatan transfer dan jumlah satuan kerja tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan.

2.8 Pemeriksaan Keuangan LKPD

Kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah menurut Kawedar dalam Khasanah dan Rahardjo (2014) dapat ditingkatkan dengan melakukan audit laporan keuangan pemerintah daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Definisi pemeriksaan keuangan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan keuangan menghasilkan opini terhadap tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

2.9 Kerangka Pikir



2.10 Hipotesis

Dalam penelitian ini hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H₁ : Diduga opini audit memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan.

H₂ : Diduga temuan audit memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan.

H₃ : Diduga variabel temuan audit yang paling berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan.

H₄ : Diduga variabel opini audit dan temuan audit berpengaruh secara Bersama-sama terhadap pengungkapan laporan keuangan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Daerah dan Waktu Penelitian

Daerah atau tempat penelitian ini dilakukan pada kantor Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Selatan. Tempat ini dipilih oleh penulis karena BPK merupakan Badan Pemeriksa yang berdiri secara independen, terpercaya dan menjadi satu-satunya lembaga eksternal pemerintah yang mengaudit atau memeriksa keuangan disektor publik.

Dalam penelitian ini penulis dalam melakukan penelitiannya memerlukan waktu dalam mempersiapkan data yaitu 4 (empat) bulan, yaitu dari bulan Februari-Mei 2019.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam mengumpulkan data melakukan studi kasus di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan. Data opini dan temuan audit yang menjadi variabel bebas (*independent variable*) dan akan diuji dalam penelitian ini, data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada Auditor yang ada di BPK.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data pada penelitian ini yaitu menggunakan jenis data kuantitatif. dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung dengan menyebarkan kuesioner kepada responden atau Auditor yang

berada di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan.

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh Auditor yang ada di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah mencapai 95 Auditor. Dengan metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan tujuan tertentu, sehingga sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebanyak 50 Auditor untuk mengantisipasi data yang tidak kembali atau tidak lengkap. Karena berdasarkan pengalaman empiris dari ahli statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 sudah dapat dinyatakan berdistribusi normal.

3.5 Metode Analisis

Penelitian ini bersifat kuantitatif dalam melakukan analisis data, sehingga diperlukan pengujian variabel-variabel dengan menguji hubungan antar variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*). Dalam penelitian ini penulis menggunakan data model penelitian di regresi linear. Penulis menggunakan analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif untuk menentukan batas minimum dan batas maksimum data, pengujian asumsi dasar pada model regresi linear, dan pengujian hipotesis pada hasil regresi linear dengan menggunakan T-statistik dan F-statistik.

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Penulis melakukan analisis deskriptif terhadap data laporan keuangan pemerintahan daerah yang disajikan sampel dalam penelitian ini sebelum regresi

dilakukan dan analisis lebih lanjut terhadap hasil dari regresi tersebut. Analisis statistik deskriptif yang dilakukan terdiri dari rata-rata (*mean*). Dan standar deviasi untuk mendeskripsikan data masing-masing variabel penelitian dan untuk menentukan batas minimum dan batas maksimum data dari masing-masing variabel penelitian.

3.5.2 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah/valid atau tidaknya suatu kuesioner sebagai suatu instrumen penelitian. kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Sunyoto, 2011:72).

Pengujian digunakan dengan menggunakan metode korelasi *product moment pearson* yang kemudian dibandingkan dengan r_{tabel} . Nilai r_{tabel} diperoleh dari *degree of freedom* = $n-k$, dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel. Apabila nilai korelasinya lebih kecil dari nilai r_{tabel} , maka pernyataan dianggap tidak valid dan harus dikeluarkan dari pengujian.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel yang diteliti (Sunyoto, 2011:67). Pernyataan dalam kuesioner dikatakan handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten. Uji reliabilitas pengukuran dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *cronbach's alpha* dengan

bantuan *software* SPSS 24.0. koefisien *cronbach's alpha* yang lebih dari nilai r_{tabel} disebut reliabel. Ada juga yang berpendapat reliabel jika *cronbach's alpha* > 0.60 (Sunyoto, 2011:68). Nilai *cronbach's alpha* yang semakin mendekati 1 menunjukkan semakin tinggi konsistensi internal reliabilitas.

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Estimasi atau asumsi model harus bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimate*), estimator yang bersifat BLUE diantaranya adalah bersifat linear, bersifat tidak bias dan efisien. Untuk menghasilkan hal tersebut ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi, yaitu, (1) Nilai harapan rata-rata adalah nol, (2) variannya tetap, (3) tidak ada hubungannya antara variabel bebas dan *error term*, (4) tidak ada korelasi serial antara *error*.

Dalam pengujian regresi ini, penyusunan melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Jika data tidak terdistribusi secara normal, maka metode statistik parametrik tidak dapat digunakan dan harus digunakan metode statistik non parametrik. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika nilai signifikansi > 0.05 maka distribusi data bisa dikatakan normal (Ghozali,2013).

2. Uji Heterokedastisitas (*Heterocedasticity*)

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah ada gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian ini. Gejala heteroskedastisitas sering muncul dalam data *cross section*, tetapi juga bisa terjadi pada data *time series*. Jika terdapat heteroskedastisitas dalam model ini, maka varians tidak sama atau *error* tidak konsisten. *Error* yang diharapkan adalah variasinya seragam sehingga *error*-nya konsisten. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS, dimana untuk menguji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat nilai perbandingan nilai signifikan t dengan standar *error* yaitu 0.05 atau 5%.

3. Uji Multikolinearitas (*Multicollinearity*)

Multikolinearitas adalah gejala adanya hubungan linear yang signifikan antara beberapa atau semua variabel independen yang ada didalam model regresi. Dalam praktiknya, umumnya multikolinearitas tidak dapat dihindari. Dalam artian sulit menemukan dua variabel bebas secara matematis tidak berkorelasi ($\text{korelasi} = 0$). Akan tetapi, ada multikolinearitas yang signifikan dan tidak signifikan (mendekati nol). Model penelitian yang baik memiliki multikolinearitas yang rendah sebab jika multikolinearitas tinggi maka model kita tidak bias memisahkan efek parsial dari suatu variabel bebas terhadap variabel bebas lainnya. Untuk melihat adanya multikolinearitas dengan melihat pengujian *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance* dengan menggunakan program SPSS 24. Maka dapat dikatakan tidak ada multikolinearitas.

4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi didefinisikan sebagai terjadinya suatu korelasi diantara data pengamatan, dimana munculnya suatu data dipengaruhi oleh data sebelumnya. Jika terjadi autokorelasi maka dapat dikatakan koefisien korelasi yang diperoleh kurang akurat. Identifikasi secara statistik ada tidaknya gejala autokorelasi dapat dilakukan dengan menghitung nilai Durbin-Watson (dw). Nilai dw dianggap tidak berbahaya jika terletak didaerah $du < dw < 4du$. Secara konvensional dapat dikatakan bahwa suatu persamaan regresi telah memenuhi asumsi autokorelasi jika nilai dari uji dw mendekati dua atau lebih.

3.5.4 Uji Hipotesis

1. Uji F-statistik

Uji F-statistik ini dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan atau tidak. itu dapat dilihat dari nilai probabilitas f-statistik ini dibandingkan dengan $\alpha = 5\%$

- a. Jika probabilitas f-statistik $< \alpha = 5\%$, maka H_0 ditolak.
- b. Jika probabilitas f-statistik $> \alpha = 5\%$, maka H_0 diterima.

2. Uji Persamaan Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda yang bertujuan untuk menguji hubungan pengaruh antar satu variabel terhadap variabel lainnya. Variabel yang dipengaruhi disebut variabel dependen sedangkan variabel yang

mempengaruhi disebut variabel independen. Model persamaannya di gambarkan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y : Pengungkapan Laporan Keuangan

a : Konstanta

b_1 : Koefisien Regresi Dari Variabel Opini Audit

b_2 : Koefisien Regresi Dari Variabel Temuan Audit

X_1 : Variabel Opini Audit

X_2 : Variabel Temuan Audit

e : *Error*

3. Koefisien Determinasi Berganda (R^2)

Koefisien determinasi berganda (R^2) berguna untuk mengukur besarnya sambungan variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependennya. Koefisien determinasi berganda memiliki nilai antara 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$). Dimana bila semakin tinggi nilai R^2 , suatu regresi tersebut maka akan semakin baik. Hal ini berarti bahwa keseluruhan variabel independen secara bersama-sama mampu menerangkan variabel dependennya.

4. Uji T-statistik

Uji t-statistik ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi dan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Untuk mengetahui apakah koefisien variabel

independen memiliki hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel dependennya, dapat dilihat dari probabilitas t-statistik ini dibandingkan dengan $\alpha=5\%$.

- a. Jika probabilitas t-statistik $< \alpha = 5\%$, maka H_0 ditolak.
- b. Jika probabilitas t- statistik $> \alpha = 5\%$, maka H_0 diterima.

3.6 Definisi Operasional

3.6.1 Variabel Independen

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah opini audit dan temuan audit. Opini audit baik sektor privat maupun sektor publik dibedakan menjadi 5 (Lima) kategori kemudian diurutkan dari opini terbaik hingga opini terburuk yaitu:

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),
2. Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Bahasa Penjelasan (WTP DBP),
3. Wajar Dengan Pengecualian (WDP),
4. Tidak Wajar (TW),
5. Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Sedangkan untuk temuan Audit BPK dalam melakukan pemeriksaan pada pemerintah daerah melaporkan hasil temuannya yang berupa, kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI), ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, dan tingkat penyimpangan yang dihasilkan oleh ketidakpatuhannya terhadap perundang-undangan yang berlaku.

3.6.2 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Jeneponto. Sehingga menghasilkan *output* laporan keuangan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.



BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Instansi

4.1.1 Dasar Hukum dan Kedudukan BPK RI

Keberadaan BPK telah termaktub dalam UUD RI Tahun 1945 perubahan ketiga Bab VIII A tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Reformasi konstitusi terhadap BPK telah memberikan landasan hukum dan gerak yang kuat bagi BPK untuk mewujudkan lembaga pemeriksa yang independen, profesional dan penuh integritas dalam melaksanakan pemeriksaan atas penyelenggaraan keuangan negara. Hal ini ditunjukkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Kedudukan BPK sebagai Lembaga Keuangan Negara yang bebas dan mandiri dipertegas dalam TAP MPR RI Nomor X/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Lembaga-Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001 dan TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2002 yang menegaskan kembali kedudukan BPK sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara serta peranannya yang bebas dan mandiri perlu dimantapkan posisinya.

BPK didukung oleh seperangkat UU, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. BPK RI berkedudukan di

Jakarta dan memiliki perwakilan di setiap provinsi dimana ketentuan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.

4.1.2 Sejarah Perwakilan

Sejalan dengan perkembangan sejarah Indonesia, BPK RI juga mengalami berbagai perkembangan. Sekitar 30 Tahun setelah lembaga tinggi Negara yang bernama Badan Pemeriksa Keuangan dan yang dikenal dengan singkatan Bepeka ini hijrah dari Yogyakarta ke Bogor dan kemudian ke Jakarta, BPK RI baru mempunyai satu perwakilan Bepeka, yang kemudian dikenal dengan nama Perwakilan Bepeka Wilayah II di Yogyakarta. Selanjutnya pada usianya yang ke 34, Bepeka mulai mengembangkan sayapnya untuk mengimbangi tuntutan akan peningkatan mutu hasil pemeriksaan. Mengingat semakin meningkatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari tahun ke tahun serta tanggung jawab tugas pemeriksaan yang semakin meningkat pula, maka pada tahun 1981 dibentuk Perwakilan Bepeka Wilayah III berdasarkan keputusan ketua Bepeka Nomor 04/SK/K/1981 tentang Perwakilan BPK di Ujung Pandang dan Keputusan Ketua Bepeka Nomor 80/SK/K/1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan. Perwakilan Bepeka Wilayah III di Ujung Pandang diresmikan tanggal 27 Mei 1981.

Pada perkembangannya, Bepeka Wilayah III di Ujung Pandang beberapa kali mengalami perubahan nama. Perubahan nama untuk pertama kalinya adalah menjadi Perwakilan VII BPK RI di Makassar berdasarkan keputusan Ketua BPK RI Nomor 12/SK/I-VII.3/7/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK RI. Selanjutnya terjadi perubahan lagi menjadi Perwakilan BPK RI di Makassar berdasarkan keputusan Ketua BPK RI Nomor 02/SK/I-VII.3/1/2006 sebagai

perubahan keempat atas keputusan BPK RI Nomor 12/SK/I-VII.3/7/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK RI. Selanjutnya, berdasarkan keputusan BPK RI Nomor 06/K/I-XIII.2/10/2008 tentang Nama Kantor Perwakilan BPK RI, nama Perwakilan BPK RI di Makassar menjadi Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Nama kantor tersebut masih digunakan sampai sekarang.

4.1.3 Visi dan Misi BPK RI

Visi dari BPK ialah menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan Negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Guna mendukung ketercapaian visi tersebut, maka BPK menghadirkan beberapa misi, seperti memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri serta melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

4.1.4 Struktur Organisasi BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan

Struktur organisasi terdiri dari Kepala Perwakilan, Sub-Auditorat Sulawesi Selatan yang dibagi berdasarkan wilayah entitas dan sekretariat perwakilan. Berikut ini adalah para pejabat struktural di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan saat peneliti melaksanakan penelitian.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber: BPK RI, 2019

4.1.5 Pembagian Tugas

BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kota/Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dan BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh Auditor Keuangan Negara (AKN). BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdiri:

a. Kepala Sub Auditorat Sulsel I

Sub Auditorat Sulawesi Selatan I mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada **Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Selayar** serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh Auditor Keuangan Negara (AKN).

b. Kepala Sub Auditorat Sulsel II

Sub Auditorat Sulawesi Selatan II mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada **Pemerintah Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru, Kota Pare-Pare, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara** serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

c. Kepala Sub Auditorat Sulsel III

Sub Auditorat Sulawesi Selatan III mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada **Pemerintah Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur** serta BUMD dan lembaga

terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

d. Kepala Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
- b) Pengurusan sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
- c) Pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, dan keprotokolan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
- d) Penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK
- e) Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
- f) Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

e. Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia (SDM)

Subbagian SDM mempunyai tugas melaksanakan pengurusan sumber daya manusia di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

f. Kepala Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

**g. Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha
Kepala Perwakilan**

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

h. Kepala Subbagian Umum dan Teknologi Informasi

Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, teknologi informasi, dan pengelolaan arsip, serta melaksanakan pengurusan sarana dan prasarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

i. Kepala Subbagian Hukum

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan dibidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan, dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

4.2 Deskripsi Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan menyebar kuesioner pada auditor yang bekerja pada kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan menyebar kuesioner sebanyak 50 Rangkap. Pendistribusian kuesioner dilakukan dengan mendatangi secara langsung Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan dan dilakukan secara bertahap karena sebagian auditor melakukan pemeriksaan ke daerah Kabupaten atau Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagaimana biasanya, kuesioner yang tersebar kadang tidak menerima tanggapan positif dari responden secara menyeluruh, sehingga kadangkala terdapat beberapa kuesioner yang tidak dikembalikan. Dari 50 rangkap kuesioner yang telah tersebar 41 diantaranya diterima kembali, sementara 9 rangkap sisanya tidak dikembalikan. Adapun rincian pengumpulan data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Rincian Responden Penelitian

Keterangan	Jumlah Auditor
Auditorat Sulsel I	29
Auditorat Sulsel II	31
Auditorat Sulsel III	30
Total	95

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Tabel 4.2
Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	50	100%
Kuesioner yang dikembali	41	82%
Kuesioner yang tidak dikembalikan	9	18%
Kuesioner yang dapat diolah	41	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

4.2.1 Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, lama bekerja, dan pembagian wilayah entitas (Sub Auditorat). Data karakteristik responden selengkapnya dapat dilihat dalam penjelasan berikut ini:

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.

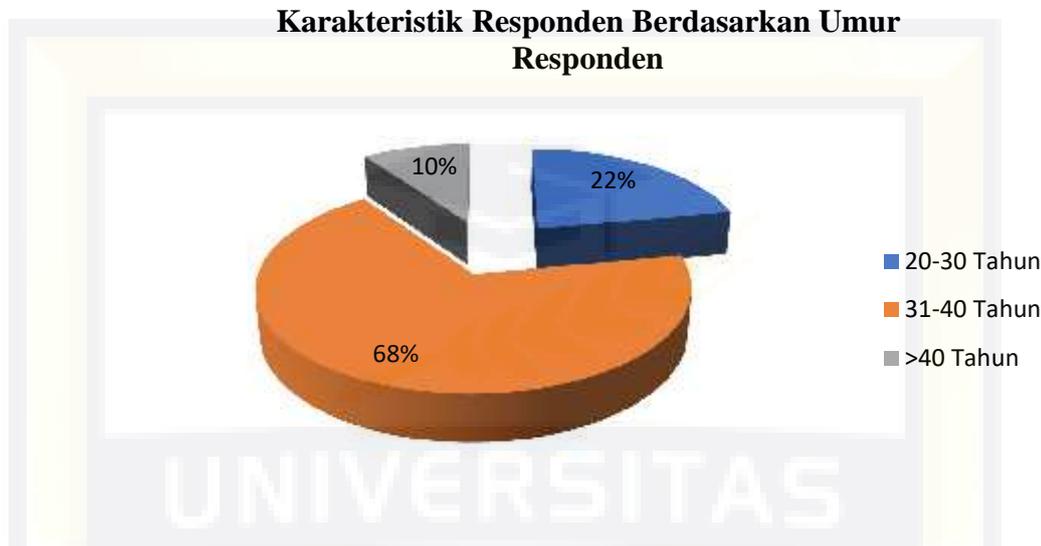
Berikut ini disajikan tabel demografi berdasarkan umur:

Tabel 4.3
Demografi Responden Berdasarkan Umur

No	Umur Responden	Jumlah	Persentase
1	20-30 Tahun	9	22%
2	31-40 Tahun	28	68%
3	>40 Tahun	4	10%
	Total	41	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Gambar 4.2
Grafik Demografi Responden Berdasarkan Umur Responden



Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia 31-40 tahun yaitu sejumlah 28 auditor (68%) diikuti responden yang berusia 20-30 tahun berjumlah 9 auditor (22%). Auditor dengan jumlah paling sedikit berdasarkan usia adalah usia >40 tahun yaitu berjumlah 4 auditor (10%).

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.

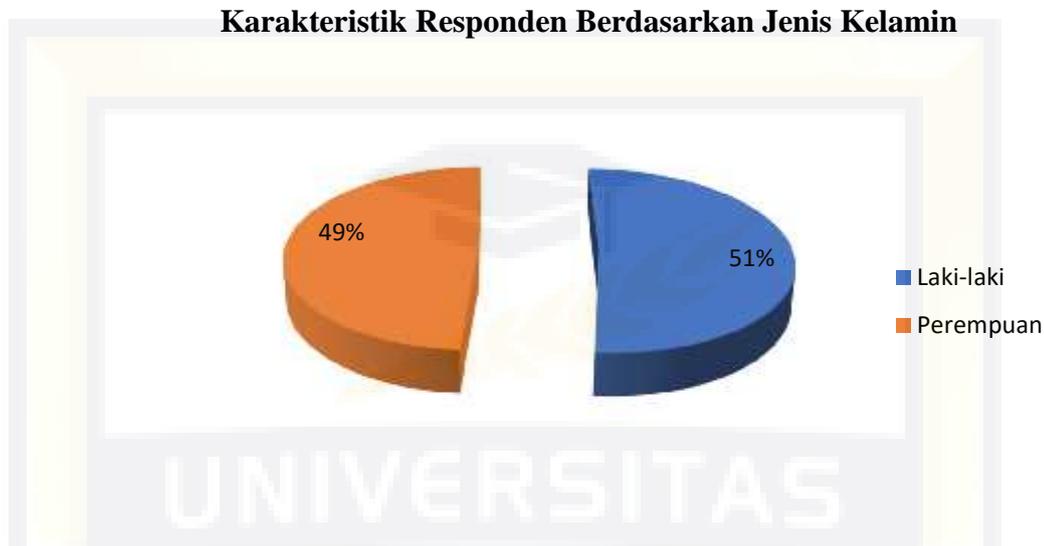
Berikut ini disajikan demografi responden berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 4.4
Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	21	51%
2	Perempuan	20	49%
	Total	41	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Gambar 4.3
Grafik Demografi Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 21 auditor (51%) dan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 20 auditor (49%).

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan.

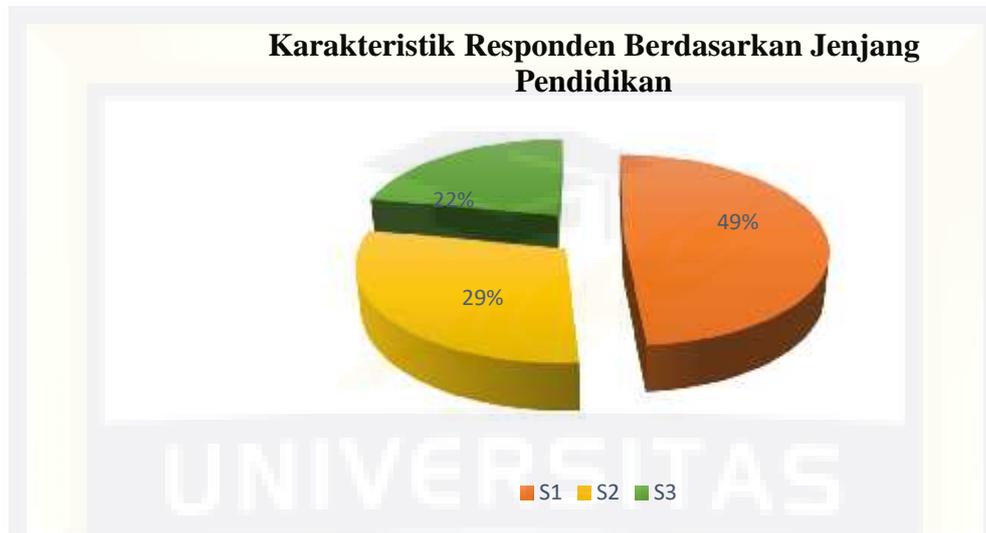
Berikut ini disajikan demografi responden berdasarkan jenjang pendidikan:

Tabel 4.5
Demografi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	S1	20	49%
2	S2	12	29%
3	S3	9	22%
	Total	41	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Gambar 4.4
Grafik Demografi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa responden yang bekerja pada kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan mayoritas responden dengan jenjang pendidikan S1 yaitu berjumlah 20 auditor (49%) diikuti responden dengan jenjang S2 berjumlah 12 auditor (29%). Lalu responden dengan jenjang pendidikan S3 yaitu berjumlah 9 auditor (20%).

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja.

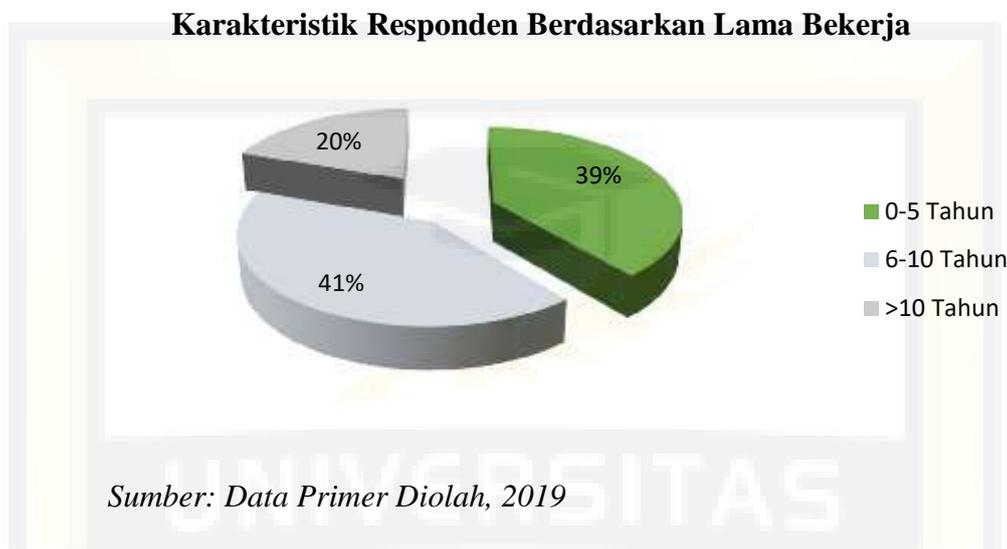
Berikut disajikan demografi responden berdasarkan lama bekerja:

Tabel 4.6
Demografi Responden Berdasarkan Lama Bekerja

No	Lama Bekerja	Jumlah	Persentase
1.	0-5 Tahun	16	39%
2	6-10 Tahun	17	41%
3	>10 Tahun	8	20%
	Total	41	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Gambar 4.5
Grafik Demografi Responden Berdasarkan Lama Bekerja



Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa mayoritas responden bekerja selama 6-10 Tahun sebanyak 17 auditor (41%), diikuti responden yang bekerja selama 0-5 tahun sebanyak 16 auditor (39%), dan responden yang bekerja >10 tahun yaitu sebanyak 8 auditor (20%).

5. Karakteristik Responden Berdasarkan Pembagian Wilayah Entitas (Sub Auditorat).

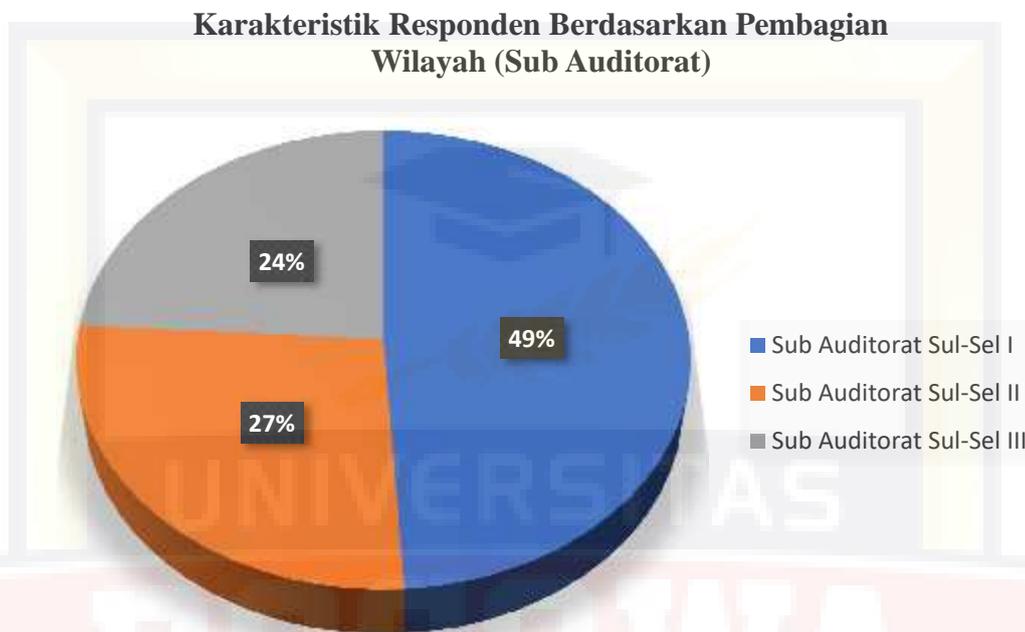
Berikut ini disajikan demografi responden berdasarkan Sub Auditorat:

Tabel 4.7
Demografi Responden Berdasarkan Sub Auditorat

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Sub Auditorat Sul-Sel I	20	49%
2	Sub Auditorat Sul-Sel II	11	27%
3	Sub Auditorat Sul-Sel III	10	24%
	Total	41	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Gambar 4.6
Grafik Demografi Responden Berdasarkan Sub Auditorat



Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Berdasarkan tabel dan grafik di atas mengenai karakteristik responden berdasarkan pembagian wilayah (Sub Auditorat) dapat dilihat bahwa mayoritas responden berada di sub auditorat sul-sel I yaitu berjumlah 20 responden atau sebesar 49% diikuti dengan responden yang berada di sub auditorat sul-sel II yang berjumlah 11 responden atau berjumlah 27% kemudian sub auditorat sul-sel III menjadi responden yang paling rendah pada penelitian ini yaitu berjumlah 10 responden atau sebesar 24%.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan teknik analisis data yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar

deviasi setiap variabel selama periode observasi untuk mendeskripsikan data masing-masing variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah opini audit, temuan audit, dan pengungkapan laporan keuangan. Variabel-variabel tersebut akan diuji dengan uji statistik deskriptif.

Tabel 4.8
Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviati on
OPINI AUDIT	41	3.60	5.00	4.2366	.37065
TEMUAN AUDIT	41	3.90	5.00	4.3610	.33308
PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN	41	3.60	5.00	4.3756	.35832
Valid N (listwise)	41				

Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2019

Keterangan:

0-1,0 = Sangat Tidak Setuju

1,1-2,0 = Tidak Setuju

2,1-3,0 = Netral

3,1-4,0 = Setuju

4,1-5,0 = Sangat Setuju

Tabel di atas menjelaskan hasil statistik deskriptif atau gambaran dari variabel-variabel dalam penelitian ini, antara lain:

1. Opini Audit (X_1)

Berdasarkan tabel di atas X_1 memiliki nilai mean 4.23 berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban sangat setuju. Nilai standar deviasi

menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,370 dari nilai rata-rata jawaban responden.

2. Temuan Audit (X_2)

Berdasarkan tabel di atas temuan audit (X_2) memiliki nilai mean 4.36 di skala nilai menunjukkan pilihan jawaban sangat setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,333 dari nilai rata-rata jawaban responden.

3. Pengungkapan Laporan Keuangan (Y)

Berdasarkan tabel di atas pengungkapan laporan keuangan (Y) memiliki nilai mean 4,37 berada di skala nilai menunjukkan pilihan jawaban sangat setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,358 dari nilai rata-rata jawaban responden.

4.3.2 Hasil Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas Data

Uji validitas data adalah data yang dapat dipercaya kebenarannya sesuai dengan kenyataan atau fakta yang terjadi di lapangan. Menurut (Sunyoto, 2011:72) bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah/valid atau tidaknya suatu kuesioner sebagai suatu instrumen penelitian. kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Uji dalam penelitian ini mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah dari tiap skor butir. Penelitian ini merupakan instrumen non-tes, maka untuk mengukur instrumen tersebut cukup

memenuhi validitas konstruksi. Pengujian validitas tiap butir digunakan analisis item yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah setiap skor butir. Teknik yang digunakan untuk menguji validitas pada penelitian ini adalah teknik korelasi *product moment* dari pearson. Hasil uji validitas untuk setiap instrumen adalah sebagai berikut:

a. Opini Audit

Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas Opini Audit

Nomor Item	r-hitung	r-tabel	Keterangan
1	0.723	0.334	Valid
2	0.844	0.334	Valid
3	0.798	0.334	Valid
4	0.555	0.334	Valid
5	0.859	0.334	Valid
6	0.774	0.334	Valid
7	0.697	0.334	Valid

Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2019

Tabel di atas menunjukkan hasil uji validitas pada instrumen berdasarkan opini audit dengan menggunakan SPSS pengolahan data, semua item pertanyaan opini audit memiliki nilai korelasi r-hitung lebih besar dari nilai r-tabel sebesar 0.334 (tarif signifikan 5% dengan n=33) sehingga dapat dinyatakan bahwa tersebut valid.

b. Temuan Audit

Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas Temuan Audit

Nomor Item	r-hitung	r-tabel	Keterangan
1	0.479	0.334	Valid
2	0.797	0.334	Valid
3	0.874	0.334	Valid
4	0.820	0.334	Valid
5	0.862	0.334	Valid
6	0.706	0.334	Valid
7	0.731	0.334	Valid
8	0.722	0.334	Valid
9	0.372	0.334	Valid

Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2019

Tabel di atas menunjukkan hasil uji validitas pada instrumen berdasarkan temuan audit dengan menggunakan SPSS pengolahan data, semua item pertanyaan opini audit memiliki nilai korelasi r-hitung lebih besar dari nilai r-tabel sebesar 0.334 (tarif signifikan 5% dengan $n=33$) sehingga dapat dinyatakan bahwa data tersebut valid.

c. Pengungkapan Laporan Keuangan

Tabel 4.11
Hasil Uji Validitas Laporan Keuangan

Nomor Item	r-hitung	r-tabel	Keterangan
1	0.684	0.334	Valid
2	0.692	0.334	Valid
3	0.905	0.334	Valid
4	0.588	0.334	Valid
5	0.767	0.334	Valid

Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2019

Tabel di atas menunjukkan hasil uji validitas pada instrumen berdasarkan pengungkapan laporan keuangan dengan menggunakan SPSS pengolahan data, semua item pertanyaan opini audit memiliki nilai korelasi r -hitung lebih besar dari nilai r -tabel sebesar 0.334 (tarif signifikan 5% dengan $n=33$) sehingga dapat dinyatakan bahwa data tersebut valid.

2. Uji Reliabilitas Data

Tabel 4.12
Hasil Uji Reliabilitas Data Instrumen

Nomor	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1	Opini audit	0.866	Reliabel
2	Temuan Audit	0.877	Reliabel
3	Pengungkapan Laporan Keuangan	0.778	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan uji reliabilitas instrumen yang di uji melalui SPSS dapat dinyatakan bahwa instrumen variabel penelitian dinyatakan reliabel karena koefisien *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0.60.

4.3.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika nilai signifikansi > 0.05 maka distribusi data bisa dikatakan normal (Ghozali,2013). Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.13
Hasil Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		41
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	1.32960604
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.073
	<i>Positive</i>	.073
	<i>Negative</i>	-.071
<i>Test Statistic</i>		.073
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.200 ^{c,d}
<i>a. Test distribution is Normal.</i>		
<i>b. Calculated from data.</i>		
<i>c. Lilliefors Significance Correction.</i>		
<i>d. This is a lower bound of the true significance.</i>		

Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansinya adalah 0.2. nilai ini lebih besar dari nilai 0.05. ini berarti dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian uji asumsi normalitas terpenuhi dalam model regresi dalam penelitian.

2. Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Pengujian ini dilakukan dengan perbandingan nilai signifikan t dengan $\alpha = 5\%$. Bila nilai signifikan t hitung lebih kecil dari 5% maka akan terjadi heterokedastisitas, begitu juga sebaliknya jika signifikan t hitung lebih besar dari 5% maka tidak akan terjadi heterokedastisitas.

Tabel 4.14
Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	<i>Coefficients^a</i>				
	<i>Unstandardized</i>		<i>Standardized</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>Coefficients</i>		<i>Coefficients</i>		
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1 (Constant)	3.693	1.690		2.185	.035
OPINI AUDIT	.005	.061	.017	.081	.936
TEMUAN AUDIT	-.070	.054	-.267	-1.306	.199

a. *Dependent Variable: RES2*

Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2019

Berdasarkan tabel di atas terdapat masing-masing variabel independen diperoleh nilai signifikan $t > 5\%$. Variabel opini audit memiliki nilai signifikan t hitung sebesar 0.936 dan variabel temuan audit memiliki nilai signifikan 0.199. maka dapat disimpulkan bahwa dari pengujian tersebut tidak terjadi adanya heterokedastisitas

3. Uji Multikorelasi

Untuk mengetahui adanya multikorelasi dapat dilakukan dengan menguji *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance* dengan menggunakan SPSS. Berdasarkan teori, jika nilai VIF mendekati 1 berarti tidak terdapat multikorelasi, tapi jika nilai $VIF > 5$ maka ada multikorelasi. Sedangkan untuk *tolerance* dikatakan tidak mempunyai korelasi jika nilainya mendekati 1, jika memiliki nilai 0 maka mempunyai korelasi sempurna. Hasil uji multikorelasi dengan menggunakan VIF dan nilai *tolerance* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.15
Hasil Uji Multikorelasi

Model	<i>Coefficients^a</i>	
	<i>Collinearity Statistics</i>	<i>VIF</i>
	<i>Tolerance</i>	
1 (<i>Constant</i>)		
OPINI AUDIT	.587	1.703
TEMUAN AUDIT	.587	1.703

a. *Dependent Variable: PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN*

Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2019

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa variabel opini audit dan temuan audit memiliki nilai *tolerance* diatas 0.1 dan VIF lebih kecil dari 1.0

Hal ini berarti dalam model persamaan regresi tidak terdapat gejala multikolinearitas sehingga data dapat digunakan dalam penelitian ini.

4. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada suatu periode dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya dalam model regresi. Jika terjadi autokorelasi dalam model regresi berarti koefisien korelasi yang diperoleh menjadi tidak akurat, sehingga model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi. Cara yang dapat dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan pengujian *Durbin-Watson* (D-W). kriteria untuk penilaian terjadinya autokorelasi yaitu:

1. Nilai D-W berada diantara 0 hingga 1.10 berarti ada autokorelasi positif.

2. Nilai D-W berada diantara 1.10 hingga 1.54, tidak dapat diputuskan
3. Nilai D-W berada diantara 1.54 hingga 2.46 berarti tidak ada autokorelasi.
4. Nilai D-W lebih besar dari 2.46 berarti ada autokorelasi negatif.

Tabel 4.16
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.670 ^a	.449	.420	1.36415	1.836

a. Predictors: (Constant), TEMUAN AUDIT, OPINI AUDIT

b. Dependent Variable: PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN

Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2019

Berdasarkan tabel di atas menyajikan hasil uji D-W dengan menggunakan program SPSS 24.0. Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai D-W yang didapat angka sebesar 1.836 yang berarti termasuk pada kriteria ketiga pada penilaian terjadinya autokorelasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari masalah autokorelasi.

4.3.4 Hasil Uji Hipotesis

1. Uji Statistik t

Uji parsial digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan uji t yaitu dengan melihat nilai signifikansi t hitung, Jika nilai

signifikansi t hitung $<$ dari 0,05 maka dapat dikatakan variabel independen tersebut mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4.17
Hasil Uji t-Statistik

Model	<i>Coefficients^a</i>					
	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>	
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>				
1	<i>(Constant)</i>	5.555	3.015		1.843	.073
	OPINI AUDIT	.287	.109	.414	2.635	.012
	TEMUAN AUDIT	.198	.096	.324	2.065	.046

a. *Dependent Variable: PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN*
Sumber: *Data Primer Diolah SPSS, 2019*

Berdasarkan tabel di atas hasil pengujian Uji Parsial (Uji-t) hipotesis X_1 dan X_2 diperoleh bahwa opini audit dan temuan audit memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan. Pengujian pengaruh variabel opini audit dan temuan audit terhadap pengungkapan laporan keuangan dapat diketahui dengan melihat nilai t hitung untuk opini audit sebesar 2,635 dan t tabel sebesar 2,024 dengan signifikansi 0.012 dan t hitung untuk temuan audit sebesar 2.065 dan t tabel 2.024 dengan signifikansi sebesar 0,046. Nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansi yang berada di atas 0,05 yang menunjukkan adanya pengaruh dari variabel opini audit dan temuan audit terhadap pengungkapan laporan keuangan. Hasil penelitian mendukung hipotesis H_1 dan H_2 bahwa terdapat

pengaruh yang signifikan opini audit dan temuan audit terhadap pengungkapan laporan keuangan. Sedangkan untuk hipotesis ketiga (H_3) berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa temuan audit bukan variabel yang sangat berpengaruh dalam penelitian ini karena nilai t-hitungnya hanya 2.065 sedangkan opini audit memiliki nilai t-hitung 2.635.

2. Persamaan Regresi

Tahap berikutnya adalah melakukan evaluasi dan interpretasi model regresi. Maka berdasarkan tabel 4.17, maka persamaan regresi yang terbentuk pada regresi ini adalah:

$$Y=5.555-0.287X_1+0.198X_2+0.05$$

Hasil pengujian yang diperoleh di atas adalah sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 5.555 artinya jika opini audit dan temuan audit bernilai 0 maka besarnya tingkat pengungkapan laporan keuangan yang terjadi adalah sebesar 5.555.
 - b. Koefisien regresi $X_1 = 0.287$ artinya jika opini audit naik sebanyak 1 satuan, maka opini audit naik sebesar 0.287.
 - c. Koefisien regresi $X_2 = 0.198$ artinya bahwa jika temuan audit naik sebanyak 1 satuan, maka temuan audit naik sebesar 0.198.
- ## 3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi berganda (R^2) berguna untuk mengukur besarnya sambungan variabel independen secara keseluruhan terhadap

variabel dependennya. Koefisien determinasi berganda memiliki nilai antara 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$). Dimana bila semakin tinggi nilai R^2 , suatu regresi tersebut maka akan semakin baik. Hal ini berarti bahwa keseluruhan variabel independen secara bersama-sama mampu menerangkan variabel dependennya.

Tabel 4.18
Hasil Uji Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.670 ^a	.449	.420	1.36415

a. Predictors: (Constant), TEMUAN AUDIT, OPINI AUDIT

Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2019

Pada tabel di atas terlihat bahwa koefisien determinasi yang disesuaikan (*R Square*) sebesar 0.449 memberi pengertian bahwa variabel opini audit dan temuan audit variasi yang terjadi pada variabel pengungkapan laporan keuangan (Y) adalah sebesar 44.9% ditentukan oleh variabel opini audit dan temuan audit, selebihnya 45,1% ditentukan oleh faktor lain yang tidak diketahui dan tidak termasuk dalam analisis regresi ini.

4. Uji F Statistik

Uji F-statistik ini dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan atau tidak. itu dapat dilihat dari nilai probabilitas f-statistik ini dibandingkan dengan $\alpha=5\%$

c. Jika probabilitas f-statistik $< \alpha = 5\%$, maka H_0 ditolak.

d. Jika probabilitas f-statistik $> \alpha = 5\%$, maka H_0 diterima.

Hasil pengujiannya sebagai berikut:

Tabel 4.19
Hasil Uji F Statistik

ANOVA ^a						
Model		<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>Regression</i>	57.676	2	28.838	15.497	.000 ^b
	<i>Residual</i>	70.714	38	1.861		
	<i>Total</i>	128.390	40			

a. *Dependent Variable*, PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN

b. *Predictors: (Constant)*, TEMUAN AUDIT, OPINI AUDIT

Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2019

Berdasarkan tabel di atas diperoleh F hitung $15.497 > F$ Tabel 2.85 dan nilai P value sebesar 0.00 lebih kecil dari 0.05. kesimpulannya berarti bahwa secara simultan opini audit dan temuan audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan. Dengan demikian hipotesis keempat (H_4) diterima.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh opini audit dan temuan audit terhadap pengungkapan laporan keuangan pada pemerintah daerah kabupaten Jeneponto. Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan di atas maka pembahasan tentang hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh opini audit terhadap pengungkapan laporan keuangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan, hal ini dibuktikan

dengan melihat nilai t-hitung pada model regresi uji parsial yang dilakukan yaitu memiliki nilai t-hitung > t-tabel ($2,635 > 2,024$) dengan nilai signifikan sebesar 0.012. berdasarkan hasil tersebut mengindikasikan bahwa opini audit berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Evanti Andriani (2012) yang mengatakan bahwa opini audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan, penelitian tersebut menggunakan metode *lag effect* yaitu menganalisis opini tahun lalu dengan pengungkapan laporan keuangan tahun berjalan. Dari hasil penelitian ini, hipotesis pertama (H_1) diterima. Maka dari itu opini audit selalu menjadi sesuatu hal yang dapat memicu pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih berkualitas dan akuntabel sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau asimetri informasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Semakin bagus opini yang diberikan oleh BPK maka akan menjadikan masyarakat lebih percaya kepada pemerintah untuk mengelola laporan keuangan serta asset-aset yang ada di daerah tersebut.

2, Pengaruh temuan audit terhadap pengungkapan laporan keuangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa temuan audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan, hal ini dibuktikan dengan melihat nilai t-hitung pada model regresi uji parsial yang dilakukan yaitu memiliki nilai t-hitung > t-tabel ($2,065 > 2,024$) dengan nilai signifikan sebesar 0.046. berdasarkan hasil tersebut mengindikasikan bahwa temuan

audit berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan. Dari hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Evanti Andriani (2012) yang menyatakan bahwa temuan audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, hanya saja dalam penelitian yang dilakukan Evanti membagi temuan tersebut dalam beberapa karakteristik. Maka dari hasil penelitian ini, menyatakan bahwa hipotesis kedua (H_2) diterima. Itu artinya bahwa temuan audit menjadi hal yang sangat penting untuk menjadi suatu unsur yang berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah yang akan menjadikan kualitas dari laporan keuangan tersebut menjadi lebih berkualitas dan akuntabel sehingga menjadikan masyarakat bisa lebih mendapatkan kepercayaan lebih dari pemerintah, bahwa laporan keuangan daerahnya telah dikelola dengan baik. Hal tersebut yang nantinya akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau yang biasa kita sebut dengan istilah *good government*.

3. Temuan audit paling berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa temuan audit bukan variabel yang paling berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan, hal ini dibuktikan dengan melihat perbandingan nilai t-hitung opini audit dengan temuan audit pada model regresi uji parsial yang dilakukan yaitu opini audit memiliki nilai t-hitung sebesar 2,635 sedangkan nilai t-hitung untuk temuan audit sebesar 2.065 dengan nilai t-tabel 2.024.

Berdasarkan hasil tersebut mengindikasikan bahwa temuan audit bukan variabel yang paling berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Liestiani (2008) yang menyatakan bahwa temuan audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan. Dari hasil penelitian ini, maka hipotesis ketiga (H_3) ditolak. Itu artinya bahwa diantara kedua variabel yang digunakan dalam penelitian ini menyatakan bahwa keduanya sama-sama berpengaruh hanya saja diantara variabel tersebut opini audit merupakan variabel yang memiliki pengaruh yang sangat tinggi terhadap pengungkapan laporan keuangan dibandingkan dengan temuan audit. Hal ini disebabkan oleh karena opini audit selalu menjadi momok bagi pemerintah daerah karena opini tersebutlah yang membuat masyarakat bisa secara kasat mata menilai bahwa apakah pemerintah daerah tersebut sudah mengelola laporan keuangannya dengan baik atau malah sebaliknya, ketika auditor misalnya memberikan opini Tidak Wajar (TW), maka tentu penilaian publik terhadap pemerintah akan menjadi buruk dan sebaliknya ketika auditor misalnya memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), ini akan menjadikan masyarakat akan lebih percaya kepada pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerahnya. Sedangkan untuk temuan audit tidak secara langsung terekspos oleh publik secara luas sehingga publik sehingga butuh waktu untuk menilai apakah laporan keuangan tersebut sudah baik atau sebaliknya.

4. Opini audit dan temuan berpengaruh secara bersama-sama terhadap pengungkapan laporan keuangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit dan temuan audit berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap pengungkapan laporan keuangan, hal ini dibuktikan dengan melihat nilai F-hitung pada model regresi uji simultan variabel yang dilakukan yaitu memiliki nilai F-hitung $15.497 > F \text{ Tabel } 2.85$ dan nilai *P value* sebesar 0.00 nilai tersebut lebih kecil dari 0.05. Berdasarkan hasil tersebut mengindikasikan bahwa opini audit dan temuan audit berpengaruh positif dan signifikan secara Bersama-sama terhadap pengungkapan laporan keuangan. Dari hasil penelitian ini, menyatakan bahwa hipotesis keempat (H_4) diterima. Ini mengindikasikan bahwa opini audit dan temuan audit memang sangatlah menjadi sesuatu masalah pokok dalam menentukan apakah laporan keuangan pemerintah daerah tersebut bisa dikatakan baik atau tidak. Oleh karenanya opini dan temuan tersebut harus semaksimal mungkin diperhatikan oleh pemerintah daerah agar laporan keuangan pemerintah daerah menjadi berkualitas sehingga bisa sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah menjadikan sistem tata kelola pemerintahan yang baik atau *good government*.

Dengan demikian dari seluruh pengujian yang dilakukan maka dapat dikatakan bahwa opini audit dan temuan audit yang diberikan oleh BPK kepada pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto sangatlah berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan yang ada di pemerintah daerah tersebut. Hal ini

tentunya diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih berkualitas yang dapat dipercaya oleh masyarakat sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas dari pemerintah daerah. Dan mampu mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik atau *good government*.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan di Indonesia sudah mulai ada peningkatan dari tahun ke tahun, walaupun masih tergolong sangat relatif rendah. Pemerintah daerah belum sepenuhnya memahami informasi apa saja yang wajib diungkapkan dalam laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Khususnya yang terjadi di pemerintah daerah kabupaten Jeneponto yang dari 5 tahun terakhir tidak pernah mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Penelitian ini menguji pengaruh opini audit dan temuan audit terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Jeneponto. Penelitian ini menggunakan model penelitian regresi dengan menyebarkan kuesioner kepada auditor yang ada di BPK RI perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang kemudian dianalisis dengan menggunakan SPSS 24.0. Untuk hasil pengujian hipotesis tersebut menunjukkan bahwa:

1. Opini audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan. Artinya bahwa opini audit yang diberikan oleh BPK sangat berpengaruh terhadap peningkatan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Jeneponto.
2. Temuan audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Jeneponto. Artinya bahwa temuan audit yang diperoleh oleh BPK banyak yang kemudian disajikan dalam

laporan hasil pemeriksaan maka akan memicu peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah pemerintah kabupaten Jeneponto.

3. Temuan audit bukanlah menjadi sebuah variabel yang paling berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan. Artinya bahwa variabel tersebut tidak cukup untuk merepresentasikan peningkatan atau kualitas laporan keuangan yang ada di pemerintah daerah kabupaten Jeneponto.
4. Opini audit dan temuan audit secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Jeneponto. Artinya bahwa opini yang diberikan oleh BPK dan temuan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan BPK tersebut secara bersamaan dapat memicu tingkat penyajian laporan keuangan yang lebih berkualitas.

5.2 Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan metode analisis dengan menyebarkan kuesioner kemudian juga menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai data yang akan dianalisis agar supaya keakuratan dalam mengambil keputusan dapat menjadi lebih akurat dan objektif.
2. Untuk penelitian-penelitian selanjutnya sebaiknya variabel yang digunakan dapat menggunakan variabel kontrol juga agar supaya penilaian yang dapat dilakukan dengan melihat variabel lain yang dapat mempengaruhinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad P. Yusniar Y.W. 2014. Pengaruh Temuan, Tingkat Penyimpangan, Opini Audit, dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Politeknik Keuangan Negara STAN*. Yogyakarta.
- Amalia A.S. 2014. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jawa, Sumatra dan Kalimantan Tahun Anggaran 2011. *Skripsi Sarjana. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. Yogyakarta.
- Evanti Andriani. 2012. Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Pada Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi Universitas Indonesia*. Depok.
- BPK RI. 2019. Struktur Organisasi. <http://makassar.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/struktur-baru-2019-juli.jpg>. Diakses, 4 Juli 2019.
- Copley, Paul. 1991. The Association Between Municipal Pengungkapan Practices and Audit Quality, *Journal of Accounting and Public Policy*, Volume 10, Issue 4, Winter 1991, Pages 245-266
- Imam Ghozali, 2013, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Khasanah, N. L. & Rahardjo, S. N. 2014. Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD (Studi pada LKPD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012). *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 3, No. 3, 1-11.
- Lesmana, S. I. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia. *Tesis Universitas Sebelas Maret*. Surakarta.
- Liestiani Annisa (2008), "Pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia untuk Tahun Anggaran 2006" Skripsi Sarjana. Universitas Indonesia
- Muqorobin, M. M. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. *Skripsi Universitas Sebelas Maret*. Surakarta.

Nuraeni. 2010. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Thun 2008-2009. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Rahmadi M, Adi B, Fajar H.R. 2016. *Audit Sektor Publik*. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan RI

Ririn H, Afrizal T. 2015. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia". *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol.22, No.1 Maret, Hal.25-33.

Rahardian, Yan dan Wijayanti, Nanda Ayu. 2008. Evaluasi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, penelitian RUUI. (Evaluation of Pengungkapan of Local Government Financial Reporting). Working Paper, University of Indonesia

Setyaningrum, D. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit BPK. *Simposium Nasional Akuntansi 15*. Banjarmasin.

Sujarweni W.V, 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Sunyoto, Danang. 2011. *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*. Jakarta: CAPS.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Utary R.A & Ikbal M. 2014. *Audit Sektor Publik*. Interpena. Yogyakarta



LAMPIRAN

LAMPIRAN 4.2: KUESIONER PENELITIAN

Makassar, 24 Mei 2019

Hal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Yth. Bapak/Ibu

Auditor Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi

Selatan

Di

Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Universitas Bosowa Makassar, maka saya yang mengirim kuesioner ini:

Nama : Sukarman
NIM : 4515013020
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Mebutuhkan beberapa informasi untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan. Informasi yang saya peroleh dari respon yang Bapak/Ibu berikan akan sangat membantu untuk mendapatkan bukti mengenai penelitian yang berjudul **“Analisis Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto”**.

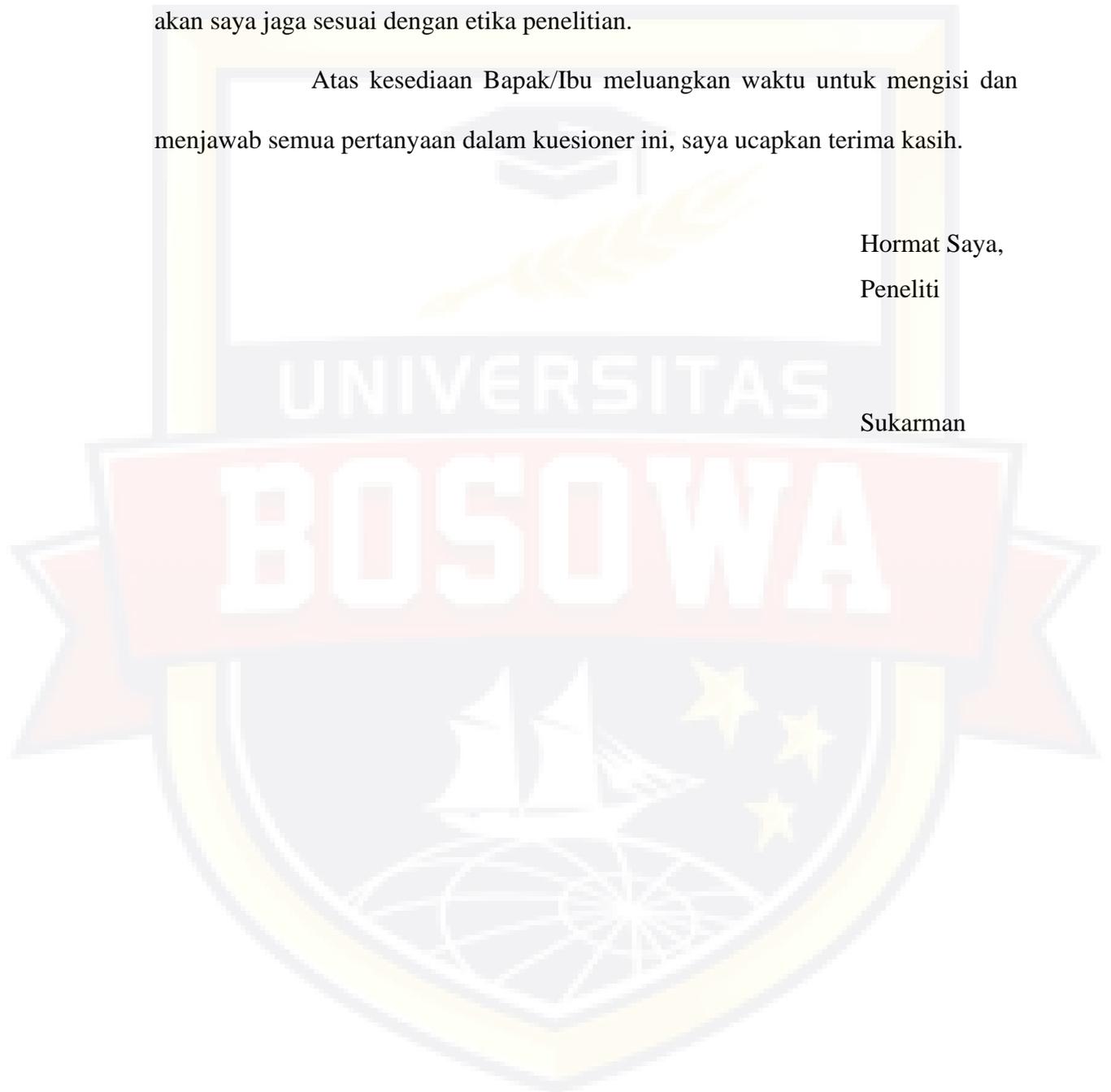
Untuk itu saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadiresponden dengan mengisi lembar kuesioner secara lengkap. Data yang

diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian tidak digunakan sebagai penilaian kinerja di tempat Bapak/Ibu bekerja, sehingga kerahasiaannya akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian.

Atas kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu untuk mengisi dan menjawab semua pertanyaan dalam kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,
Peneliti

Sukarman



DATA RESPONDEN

Nama/Inisial :

Jenis Kelamin* : Pria. Wanita

Usia : Tahun

Pendidikan Terakhir* : S1 S2 S3

Lama Bekerja* : 0-5 thn 6-10 thn >10 thn

Sub Auditorat* : Sul-Sel I Sul-Sel II Sul-Sel III

**Beri tanda check list pada kolom yang tersedia*

Dibawah ini adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai opini audit (X1), Temuan Audit (X2) dan Pengungkapan Laporan Keuangan Daerah (Y) sejauh mana variabel tersebut bisa menggambarkan sesuai keyakinan Bapak/Ibu. Saya harap tanggapan atas pertanyaan tersebut diberikan tanda *check list* (✓) pada kotak yang telah disediakan:

SS : Sangat Setuju

TS : Tidak Setuju

S : Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

N. : Netral

NO	Pertanyaan	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
Indikator : Opini Audit (X1)						
1	Auditor perlu untuk memahami sistem pengendalian internal dengan baik sehingga dapat memberikan opini audit dengan benar					
2	Kepatuhan auditor terhadap peraturan perundang-undangan digunakan untuk memperoleh kecukupan informasi mengenai kemungkinan terjadinya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan					
3	Informasi mengenai tindak kecurangan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam memberikan opini audit					
4	Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya dan pengumpulan data serta informasi lain terkait dengan LKPD yang akan diperiksa dilakukan untuk mengembangkan prosedur pemeriksaan selanjutnya					

5	Pemantauan mengenai kemungkinan terjadinya temuan yang berulang atau keyakinan pemeriksaan atas kewajaran transaksi atau akun pada LKPD yang diperiksa pada pemeriksaan sebelumnya dapat digunakan untuk memberikan opini audit				
6	Kegagalan dalam memperoleh bukti yang kompeten membuat lingkup audit meluas				
7	Auditor dalam memberikan opini audit harus didasari dengan sikap profesional, independensi, dan integritas yang tinggi				
Indikator : Temuan Audit (X2)					
8	Temuan audit bisa menemukan sekecil apapun kesalahan atau penyimpangan yang ada				
9	Temuan harus dilaporkan sesuai fakta yang ada				
10	Kekeliruan dalam pengumpulan dan pemilihan bukti serta informasi dapat menghambat proses penyelesaian pemeriksaan				
11	Temuan audit tidak boleh direkayasa				
12	Temuan atas tingkat penyimpangan LKPD dijadikan salah satu dasar pertimbangan auditor dalam memberikan opini audit				
13	Temuan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dijadikan salah satu dasar pertimbangan auditor dalam memberikan opini audit				

14	Temuan atas kelemahan sistem pengendalian internal dapat dijadikan salah satu dasar pertimbangan auditor dalam memberikan opini audit					
15	Proses pengumpulan dan pengujian bukti harus dilakukan dengan maksimal untuk mendukung kesimpulan, temuan audit serta rekomendasi yang terkait					
16	Temuan audit harus memuat seluruh aspek pemeriksaan					
Indikator : Pengungkapan Laporan Keuangan Daerah (Y)						
17	Laporan yang dihasilkan harus akurat, lengkap, obyektif, meyakinkan, jelas, ringkas, serta tepat waktu agar informasi yang diberikan bermanfaat secara maksimal					
18	Pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan hasil pemeriksaan					
19	Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah harus tetap terjaga					
20	Laporan keuangan pemerintah daerah memuat informasi yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat					
21	Para pengguna Laporan keuangan pemerintah daerah dapat memahami laporan keuangan dengan baik					

Sumber : Data diolah Suhartini dan Ariyanto, 2009

LAMPIRAN: JAWABAN RESPONDEN UJI VALIDITAS X1

RES.	1	2	3	4	5	6	7	JUMLAH
1	4	4	4	4	4	4	4	28
2	4	4	4	4	4	5	4	29
3	4	4	4	5	4	4	5	30
4	4	4	5	5	4	4	4	30
5	4	4	4	4	4	4	4	28
6	4	4	4	4	4	4	4	28
7	4	4	4	4	5	4	4	29
8	4	4	5	4	4	4	3	28
9	5	4	4	4	4	4	4	29
10	4	4	4	4	4	4	4	28
11	5	4	4	4	4	4	4	29
12	4	4	5	4	4	4	4	29
13	4	4	4	3	4	4	4	27
14	4	4	4	3	3	4	4	26
15	5	5	5	5	5	5	5	35
16	4	4	4	4	4	5	4	29
17	5	5	5	5	5	5	5	35
18	5	5	5	5	5	5	5	35
19	4	4	4	4	4	4	4	28
20	4	4	4	5	5	5	5	32
21	5	5	5	4	5	5	5	34
22	4	4	5	4	5	5	5	32
23	4	4	5	3	4	4	4	28
24	4	5	5	4	5	5	5	33
25	4	4	4	4	5	4	4	29
26	5	5	5	3	5	5	5	33
27	4	4	4	3	5	5	5	30
28	4	4	4	3	4	5	4	28
29	4	4	4	3	3	3	4	25
30	4	4	5	5	5	5	5	33
31	5	5	3	2	4	5	4	28
32	4	4	4	4	5	5	5	31
33	4	4	4	2	5	5	4	28
34	4	4	4	2	5	4	4	27
35	4	4	4	2	5	5	4	28

LAMPIRAN: JAWABAN RESPONDEN UJI VALIDITAS VARIABEL X2

RES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	JUMLAH
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
2	4	4	4	5	4	4	4	4	4	33
3	4	4	4	5	4	4	4	5	4	34
4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	35
5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	33
6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	31
7	5	4	4	4	4	5	4	4	4	34
8	4	5	4	5	4	4	4	4	4	34
9	5	4	5	4	5	4	4	4	5	35
10	4	4	4	4	4	4	5	4	4	33
11	4	4	4	5	5	4	4	4	5	34
12	4	4	4	4	4	5	4	4	4	33
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
14	4	4	5	5	5	4	4	4	4	35
15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
16	4	4	4	3	4	4	5	4	4	32
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
18	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
20	3	4	4	5	4	5	5	4	4	34
21	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
22	4	5	5	5	4	4	4	5	4	36
23	4	5	4	5	4	4	4	4	4	34
24	4	5	4	5	4	4	5	5	4	36
25	4	4	4	4	4	5	5	5	4	35
26	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
28	4	5	5	5	5	5	5	5	4	39
29	4	5	4	5	4	5	4	4	4	35
30	4	4	4	5	4	4	5	4	4	34
31	3	4	5	5	4	4	4	4	5	33
32	4	4	4	4	5	4	4	4	4	33
33	4	4	5	5	4	5	5	5	4	37
34	4	5	4	5	4	4	4	4	4	34
35	4	4	5	5	4	5	5	5	4	37

LAMPIRAN: JAWABAN HASIL UJI VALIDITAS VARIABEL Y

RES	1	2	3	4	5	JUMLAH
1	5	4	5	4	4	22
2	4	4	5	4	4	21
3	5	4	5	4	5	23
4	5	4	4	4	4	21
5	4	5	4	4	5	22
6	4	5	5	5	5	24
7	4	4	4	4	4	20
8	4	4	4	4	4	20
9	4	4	4	4	4	20
10	4	4	4	5	4	21
11	5	5	5	4	4	23
12	4	5	4	4	4	21
13	4	5	5	4	4	22
14	4	4	5	4	4	21
15	5	5	5	5	5	25
16	4	4	4	4	4	20
17	5	5	5	5	5	25
18	5	5	5	5	5	25
19	4	4	4	4	4	20
20	5	4	5	5	4	23
21	5	5	5	5	5	25
22	4	5	4	4	4	21
23	4	5	4	4	4	21
24	5	5	5	5	5	25
25	5	4	5	4	4	22
26	5	4	5	5	5	24
27	4	4	4	4	4	20
28	4	4	4	4	4	20
29	5	4	5	4	4	22
30	5	4	5	4	3	21
31	4	4	4	3	3	18
32	5	4	4	4	4	21
33	5	4	4	4	4	21
34	5	4	4	4	4	21
35	5	4	4	4	4	21

LAMPIRAN: HASIL JAWABAN RESPONDEN VARIABEL X1

RES	1	2	3	4	5	6	7	JUMLAH
1	5	5	4	5	4	5	4	32
2	5	4	3	3	3	4	5	27
3	5	5	5	5	5	4	5	34
4	3	2	3	5	2	1	2	18
5	5	5	4	4	5	5	5	33
6	5	5	5	5	5	4	4	33
7	5	5	5	5	5	5	5	35
8	5	5	5	4	4	4	5	32
9	4	5	4	4	4	3	4	28
10	3	5	5	5	4	4	5	31
11	4	5	4	4	4	5	5	31
12	5	5	5	5	5	5	5	35
13	5	5	5	5	5	5	5	35
14	5	5	5	5	5	5	5	35
15	4	4	4	4	4	4	4	28
16	4	4	2	4	3	3	5	25
17	5	5	4	5	5	4	4	32
18	4	4	2	3	3	5	4	25
19	5	5	5	4	5	3	5	32
20	5	5	5	5	5	5	5	35
21	5	5	5	5	5	5	5	35
22	5	5	5	5	5	5	5	35
23	4	4	4	4	4	2	4	26
24	4	5	5	5	5	4	4	32
25	5	4	5	4	4	4	5	31
26	5	5	4	4	3	3	5	29
27	5	5	5	4	4	4	5	32
28	5	5	5	5	5	5	5	35
29	5	4	5	4	5	5	4	32
30	5	5	5	5	4	5	5	34
31	5	5	5	4	4	4	5	32
32	4	4	4	3	4	3	4	26
33	4	4	4	4	4	3	4	27
34	5	5	5	5	5	5	5	35
35	5	4	4	4	4	5	4	30
36	4	4	5	4	4	4	5	30
37	4	4	4	3	5	5	5	30
38	4	5	5	5	5	5	5	34
39	4	4	4	3	4	4	4	27
40	4	4	4	3	4	4	4	27
41	4	4	4	2	5	5	5	29

LAMPIRAN: HASIL JAWABAN RESPONDEN VARIABEL X2

RES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	JUMLAH
1	4	5	5	5	4	5	5	4	5	42
2	4	5	4	4	3	3	3	4	5	35
3	5	5	4	5	5	4	4	5	4	41
4	5	2	1	3	1	4	2	3	5	26
5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	42
6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
8	5	5	5	5	4	5	4	5	5	43
9	5	5	5	5	5	5	4	4	4	42
10	3	5	4	5	4	4	4	5	5	39
11	5	5	5	5	4	5	4	5	5	43
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
16	4	5	4	5	4	4	3	5	4	38
17	4	5	5	5	5	5	5	5	5	44
18	4	5	4	5	5	4	4	5	4	40
19	5	5	5	5	5	5	3	5	5	43
20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
21	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
24	4	4	4	4	4	5	4	5	4	38
25	5	5	4	5	4	4	4	4	5	40
26	4	5	4	5	4	5	4	4	5	40
27	5	5	4	5	4	4	4	4	4	39
28	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
29	4	5	5	4	4	5	5	5	4	41
30	5	5	3	5	5	5	3	5	5	41
31	5	5	5	5	5	5	4	5	5	44
32	4	5	3	5	4	4	4	5	5	39
33	3	4	3	4	4	4	4	4	4	34
34	5	5	5	5	5	5	4	5	5	44
35	5	5	5	5	4	5	4	5	4	42
36	4	4	4	5	5	4	4	4	4	34
37	2	4	4	4	5	5	5	5	4	34
38	5	5	5	5	5	5	5	5	4	40
39	4	4	5	5	5	4	4	4	4	35
40	5	4	4	5	4	4	4	4	4	34
41	2	4	4	5	5	5	5	5	4	35

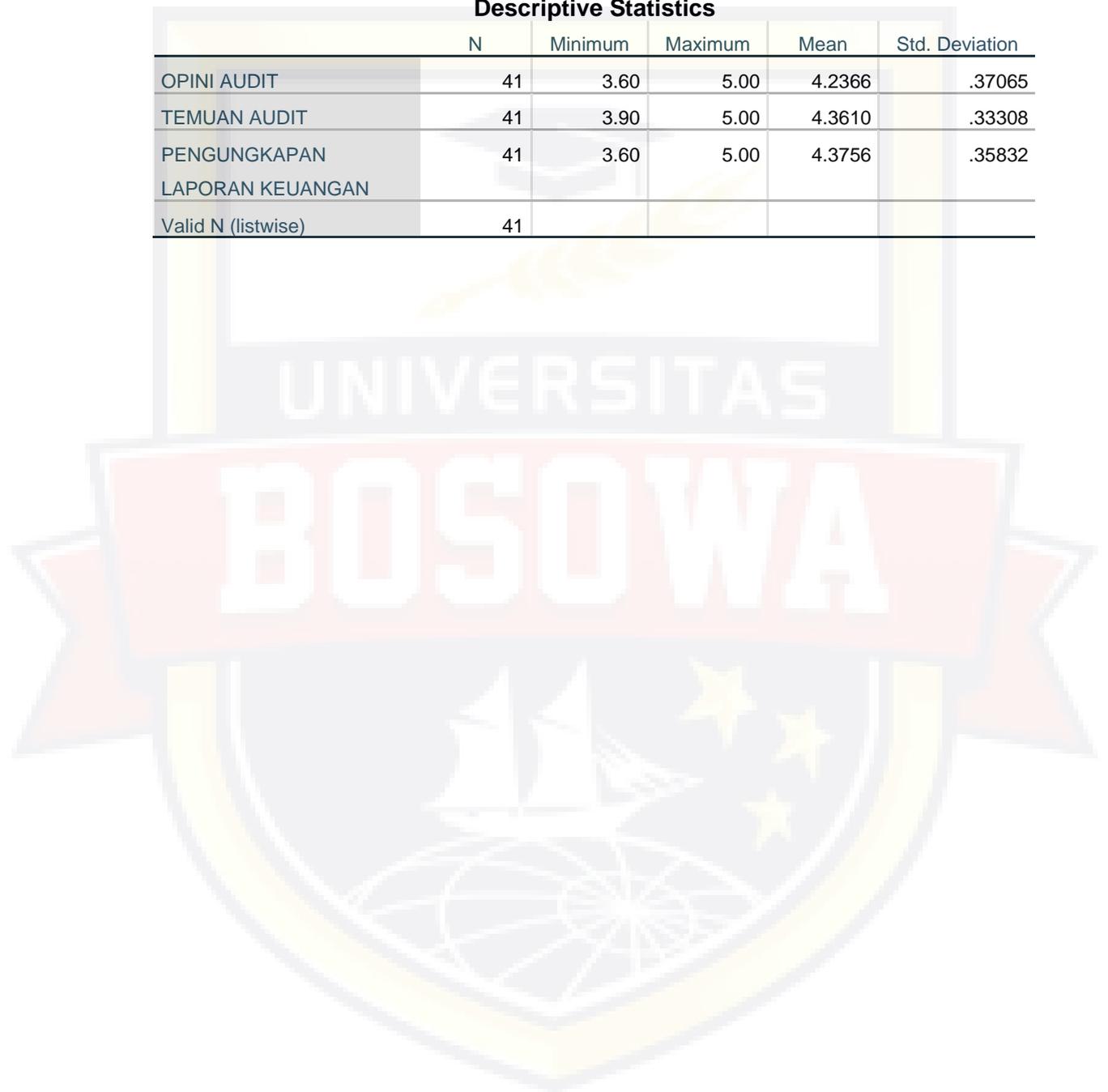
LAMPIRAN: HASIL JAWABAN RESPONDEN VARIABEL Y

RES	1	2	3	4	5	JUMLAH
1	5	5	5	4	5	24
2	5	4	4	4	4	21
3	5	5	5	5	4	24
4	2	4	2	4	2	14
5	4	4	4	5	4	21
6	5	5	5	5	5	25
7	5	5	5	5	5	25
8	4	5	5	5	4	23
9	4	4	4	4	4	20
10	5	3	5	5	3	21
11	4	5	5	5	5	24
12	5	5	5	5	5	25
13	5	5	5	5	3	23
14	5	5	5	5	5	25
15	4	4	4	4	4	20
16	5	3	4	4	4	20
17	5	4	5	5	5	24
18	4	5	5	5	5	24
19	3	5	5	5	5	23
20	5	5	5	5	5	25
21	5	5	5	5	5	25
22	5	5	5	5	5	25
23	4	4	4	4	4	20
24	5	4	4	4	5	22
25	5	5	5	5	4	24
26	5	5	4	4	4	22
27	5	5	5	5	4	24
28	5	5	5	5	5	25
29	4	5	5	4	4	22
30	5	5	5	5	5	25
31	5	5	5	5	4	24
32	5	5	5	4	4	23
33	4	4	4	4	4	20
34	5	5	5	5	5	25
35	5	5	5	3	5	23
36	4	4	4	4	4	20
37	5	4	5	4	5	23
38	5	5	5	5	5	25
39	5	4	4	4	4	21
40	5	5	5	4	4	23
41	5	4	5	4	5	23

LAMPIRAN 4.3.1 HASIL UJI STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
OPINI AUDIT	41	3.60	5.00	4.2366	.37065
TEMUAN AUDIT	41	3.90	5.00	4.3610	.33308
PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN	41	3.60	5.00	4.3756	.35832
Valid N (listwise)	41				



LAMPIRAN 4.3.2.1 HASIL UJI VALIDITAS DATA

Correlations

		OA1	OA2	OA3	OA4	OA5	OA6	OA7	X1
OA1	Pearson Correlation	1	.546**	.476**	.166	.543**	.580**	.558**	.723**
	Sig. (2-tailed)		.001	.004	.340	.001	.000	.000	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35
OA2	Pearson Correlation	.546**	1	.602**	.364*	.677**	.583**	.726**	.844**
	Sig. (2-tailed)	.001		.000	.032	.000	.000	.000	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35
OA3	Pearson Correlation	.476**	.602**	1	.555**	.748**	.380*	.424*	.798**
	Sig. (2-tailed)	.004	.000		.001	.000	.024	.011	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35
OA4	Pearson Correlation	.166	.364*	.555**	1	.516**	.270	.069	.555**
	Sig. (2-tailed)	.340	.032	.001		.002	.117	.694	.001
	N	35	35	35	35	35	35	35	35
OA5	Pearson Correlation	.543**	.677**	.748**	.516**	1	.578**	.415*	.859**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.002		.000	.013	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35
OA6	Pearson Correlation	.580**	.583**	.380*	.270	.578**	1	.543**	.774**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.024	.117	.000		.001	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35
OA7	Pearson Correlation	.558**	.726**	.424*	.069	.415*	.543**	1	.697**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.011	.694	.013	.001		.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35
X1	Pearson Correlation	.723**	.844**	.798**	.555**	.859**	.774**	.697**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000	
	N	35	35	35	35	35	35	35	35

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		TA1	TA2	TA3	TA4	TA5	TA6	TA7	TA8	TA9	X2
TA1	Pearson Correlation	1	.598**	.576**	.709**	.574**	.727**	.474**	.605**	.149	.752**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.004	.000	.394	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
TA2	Pearson Correlation	.598**	1	.816**	.940**	.830**	.678**	.699**	.830**	.039	.911**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.823	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
TA3	Pearson Correlation	.576**	.816**	1	.752**	.802**	.727**	.800**	.709**	.068	.892**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.697	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
TA4	Pearson Correlation	.709**	.940**	.752**	1	.833**	.754**	.679**	.831**	.096	.926**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.585	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
TA5	Pearson Correlation	.574**	.830**	.802**	.833**	1	.697**	.750**	.787**	.009	.896**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.959	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
TA6	Pearson Correlation	.727**	.678**	.727**	.754**	.697**	1	.725**	.782**	.103	.868**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.558	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
TA7	Pearson Correlation	.474**	.699**	.800**	.679**	.750**	.725**	1	.680**	.064	.836**
	Sig. (2-tailed)	.004	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.715	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
TA8	Pearson Correlation	.605**	.830**	.709**	.831**	.787**	.782**	.680**	1	-.002	.879**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.990	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
TA9	Pearson Correlation	.149	.039	.068	.096	.009	.103	.064	-.002	1	.149
	Sig. (2-tailed)	.394	.823	.697	.585	.959	.558	.715	.990		.394
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
X2	Pearson Correlation	.752**	.911**	.892**	.926**	.896**	.868**	.836**	.879**	.149	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.394	
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		P1	P2	P3	P4	P5	Y
P1	Pearson Correlation	1	.198	.610**	.184	.417*	.684**
	Sig. (2-tailed)		.254	.000	.291	.013	.000
	N	35	35	35	35	35	35
P2	Pearson Correlation	.198	1	.580**	.338*	.459**	.692**
	Sig. (2-tailed)	.254		.000	.047	.006	.000
	N	35	35	35	35	35	35
P3	Pearson Correlation	.610**	.580**	1	.516**	.595**	.905**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.002	.000	.000
	N	35	35	35	35	35	35
P4	Pearson Correlation	.184	.338*	.516**	1	.233	.588**
	Sig. (2-tailed)	.291	.047	.002		.178	.000
	N	35	35	35	35	35	35
P5	Pearson Correlation	.417*	.459**	.595**	.233	1	.767**
	Sig. (2-tailed)	.013	.006	.000	.178		.000
	N	35	35	35	35	35	35
Y	Pearson Correlation	.684**	.692**	.905**	.588**	.767**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	35	35	35	35	35	35

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

LAMPIRAN 4.3.2.2 UJI RELIABILITAS DATA

Reliability		
Notes		
Output Created		02-JUL-2019 01:38:10
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet8
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	35
	Matrix Input	
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure.
Syntax		RELIABILITY /VARIABLES=OA1 OA2 OA3 OA4 OA5 OA6 OA7 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA.
Resources	Processor Time	00:00:00.00
	Elapsed Time	00:00:00.00

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	35	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	35	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics		
Cronbach's		
Alpha	N of Items	
.866	7	

Reliability

Notes

Output Created	02-JUL-2019 01:42:29	
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet8
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	35
	Matrix Input	
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure.
Syntax	RELIABILITY /VARIABLES=TA1 TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TA8 TA9 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA.	
Resources	Processor Time	00:00:00.00
	Elapsed Time	00:00:00.00

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	35	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	35	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.877	9

Reliability

Notes

Output Created	02-JUL-2019 01:44:54	
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet8
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	35
	Matrix Input	
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.

Cases Used		Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure.
Syntax	RELIABILITY /VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA.	
Resources	Processor Time	00:00:00.00
	Elapsed Time	00:00:00.00

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	35	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	35	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.778	5

LAMPIRAN 4.3.3. HASIL UJI ASUMSI KLASIK

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		41
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.32960604
Most Extreme Differences	Absolute	.073
	Positive	.073
	Negative	-.071
Test Statistic		.073
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.555	3.015		1.843	.073
	OPINI AUDIT	.287	.109	.414	2.635	.012
	TEMUAN AUDIT	.198	.096	.324	2.065	.046

a. Dependent Variable: PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.693	1.690		2.185	.035
	OPINI AUDIT	.005	.061	.017	.081	.936
	TEMUAN AUDIT	-.070	.054	-.267	-1.306	.199

a. Dependent Variable: RES2

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	5.555	3.015		1.843	.073		
	OPINI AUDIT	.287	.109	.414	2.635	.012	.587	1.703
	TEMUAN AUDIT	.198	.096	.324	2.065	.046	.587	1.703

a. Dependent Variable: PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.670 ^a	.449	.420	1.36415	1.836

a. Predictors: (Constant), TEMUAN AUDIT, OPINI AUDIT

b. Dependent Variable: PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN

BUSUWA



Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.670 ^a	.449	.420	1.36415

a. Predictors: (Constant), TEMUAN AUDIT, OPINI AUDIT

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	57.676	2	28.838	15.497	.000 ^b
	Residual	70.714	38	1.861		
	Total	128.390	40			

a. Dependent Variable: PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN

b. Predictors: (Constant), TEMUAN AUDIT, OPINI AUDIT

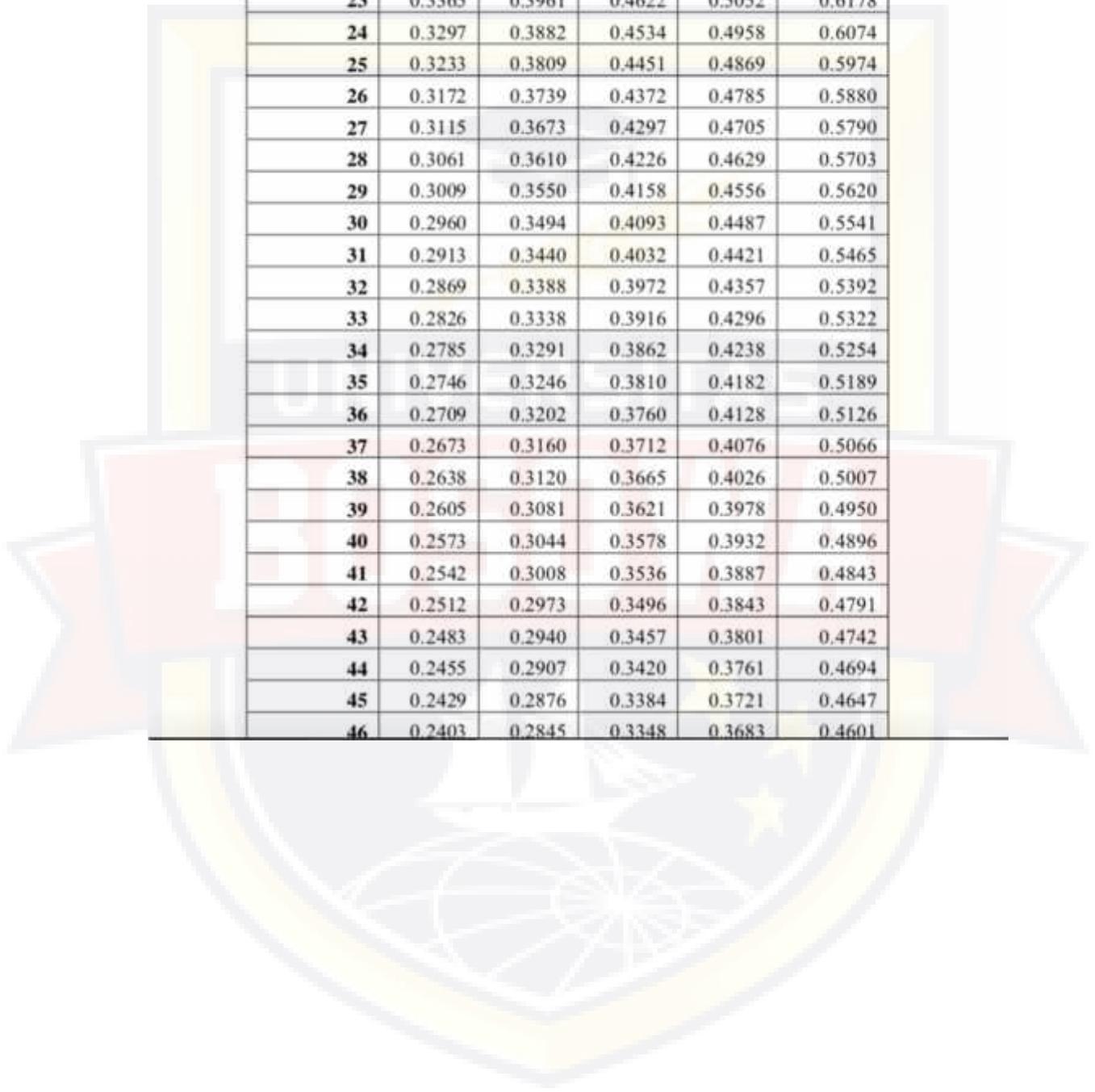
Titik Persentase Distribusi t (df = 41 - 80)

Pr df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

LAMPIRAN: R TABEL

Tabel r untuk df = 1 - 50

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
1	0.9877	0.9969	0.9995	0.9999	1.0000
2	0.9000	0.9500	0.9800	0.9900	0.9990
3	0.8054	0.8783	0.9343	0.9587	0.9911
4	0.7293	0.8114	0.8822	0.9172	0.9741
5	0.6694	0.7545	0.8329	0.8745	0.9509
6	0.6215	0.7067	0.7887	0.8343	0.9249
7	0.5822	0.6664	0.7498	0.7977	0.8983
8	0.5494	0.6319	0.7155	0.7646	0.8721
9	0.5214	0.6021	0.6851	0.7348	0.8470
10	0.4973	0.5760	0.6581	0.7079	0.8233
11	0.4762	0.5529	0.6339	0.6835	0.8010
12	0.4575	0.5324	0.6120	0.6614	0.7800
13	0.4409	0.5140	0.5923	0.6411	0.7604
14	0.4259	0.4973	0.5742	0.6226	0.7419
15	0.4124	0.4821	0.5577	0.6055	0.7247
16	0.4000	0.4683	0.5425	0.5897	0.7084
17	0.3887	0.4555	0.5285	0.5751	0.6932
18	0.3783	0.4438	0.5155	0.5614	0.6788
19	0.3687	0.4329	0.5034	0.5487	0.6652



20	0.3598	0.4227	0.4921	0.5368	0.6524
21	0.3515	0.4132	0.4815	0.5256	0.6402
22	0.3438	0.4044	0.4716	0.5151	0.6287
23	0.3365	0.3961	0.4622	0.5052	0.6178
24	0.3297	0.3882	0.4534	0.4958	0.6074
25	0.3233	0.3809	0.4451	0.4869	0.5974
26	0.3172	0.3739	0.4372	0.4785	0.5880
27	0.3115	0.3673	0.4297	0.4705	0.5790
28	0.3061	0.3610	0.4226	0.4629	0.5703
29	0.3009	0.3550	0.4158	0.4556	0.5620
30	0.2960	0.3494	0.4093	0.4487	0.5541
31	0.2913	0.3440	0.4032	0.4421	0.5465
32	0.2869	0.3388	0.3972	0.4357	0.5392
33	0.2826	0.3338	0.3916	0.4296	0.5322
34	0.2785	0.3291	0.3862	0.4238	0.5254
35	0.2746	0.3246	0.3810	0.4182	0.5189
36	0.2709	0.3202	0.3760	0.4128	0.5126
37	0.2673	0.3160	0.3712	0.4076	0.5066
38	0.2638	0.3120	0.3665	0.4026	0.5007
39	0.2605	0.3081	0.3621	0.3978	0.4950
40	0.2573	0.3044	0.3578	0.3932	0.4896
41	0.2542	0.3008	0.3536	0.3887	0.4843
42	0.2512	0.2973	0.3496	0.3843	0.4791
43	0.2483	0.2940	0.3457	0.3801	0.4742
44	0.2455	0.2907	0.3420	0.3761	0.4694
45	0.2429	0.2876	0.3384	0.3721	0.4647
46	0.2403	0.2845	0.3348	0.3683	0.4601

LAMPIRAN: F TABEL

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05															
df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.58	2.47	2.38	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

J. A. P. Pettarani Makassar, Sulawesi Selatan 90222

Telp. (0411) 854977, Fax. (0411) 854995 Website: <http://makassar.bpk.go.id>

Makassar, / April 2019

Nomor : 56/S/XIX.MKS/J4/2019
Perihal : Jawaban atas Surat Izin dan Permohonan Pengambilan
Data Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Bosowa
di
Tempat

Sehubungan dengan surat saudara nomor A-222/FE/UNIBOS/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 perihal permohonan izin pengambilan data penelitian mahasiswa, bersama ini disampaikan bahwa instansi kami dapat menerima mahasiswa :

Nama : Sukarnar
NIM : 4515017020
Program Studi : Akuntansi

Untuk melaksanakan pengambilan data penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "Analisis Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan di Kabupaten Jeneponto".

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Wahyu Priveno
NIP. 19700601199031002